

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Dokumen Pelaksanaan Penilaian Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Penilaian Resiko Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor merupakan salah satu unsur dari sistem pengendalian intern pemerintah untuk melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah serta kesesuaian dengan tujuan sasaran. Penilaian Resiko adalah rangkaian kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penerapan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mensyaratkan terbangunnya infrastruktur di setiap unturnya, salah satu unsur yang harus dibangun adalah Daftar Risiko (Risk Register) di tingkat entitas dan kegiatan

Kami berharap dengan tersusunnya penilaian resiko ini sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP.

Kami menyadari laporan ini masih belum sempurna, dikarenakan keterbatasan data serta masih rendahnya sumber daya manusia dan peralatan yang mendukung dalam mengolah dan menyajikan data yang diharapkan. Masukan dan koreksi terhadap laporan ini sangat diharapkan, agar dapat menyempurnakan penilaian resiko yang akan datang.

Akhir kata semoga Buku Risiko ini bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bogor, Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Bogor,



**Denni Wisnanto, SE., MM**

Pembina TK I - IV/b

NIP 19860622 200604 1 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, maka Inspektorat Kota Bogor telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada clean and good governance. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Dalam PP tersebut, yaitu pada pasal 13 sampai dengan pasal 17, juga dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan. Sebagai langkah pertama yang telah dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor : 64 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari

pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian Resiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarnya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas Resiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk mendapatkan Resiko yang memiliki kemungkinan (probability) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan Resiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis Resiko, selanjutnya dilakukan respon atas Resiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon Resiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Resiko mengacu pada ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara Resiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, Resiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) Resiko.

Dasar pemikiran pengelolaan Resiko adalah bahwa setiap entitas, baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik

dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian Resiko. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian Resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam PP tersebut disebutkan bahwa penilaian Resiko terdiri atas identifikasi Resiko dan analisis Resiko.

Seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah diharuskan menerapkan sistem pengendalian internal untuk pencapaian tujuan organisasi dengan mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang terdiri dari 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pimpinan Instansi Pemerintah juga perlu merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian atas risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko (Lampiran PP No.60 Tahun 2008). Oleh karena itu, framework manajemen risiko, yang merupakan perpaduan antara budaya, sistem, dan proses untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko, dari beberapa standar, dapat dirumuskan sebagai bagian dari penguatan penerapan SPIP dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

## **B. Dasar Hukum**

Implementasi SPIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berlandaskan kepada beberapa aturan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
6. Peraturan Walikota No 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2019;
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor ;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan Dokumen penilaian Resiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor adalah sebagai berikut berikut :

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian resiko pada tingkat instansi dan kegiatan utama.
2. Untuk mendapatkan daftar resiko dan analisis resiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan.

3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang (Kabid), Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
  1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
  2. Kelompok Substansi Pencegahan Dampak Lingkungan;
  3. Kelompok Substansi Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim membawahkan :
  1. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Lahan;
  2. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  3. Kelompok Substansi Konservasi Lingkungan dan Perubahan Iklim;
- e. Bidang Pengelolaan Persampahan, membawahkan :
  1. Kelompok Substansi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Serta Penyapuan Jalan;
  2. Kelompok Substansi Pengangkutan Persampahan;
  3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan;
- f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahkan :
  1. Kelompok Substansi Pembinaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Kelompok Substansi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
  3. Kelompok Substansi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- g. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A, membawahkan :
1. Kepala UPTD;
  2. Sub Bagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **E. Metodologi**

Metodologi yang digunakan dalam penilaian resiko pada Dinas Lingkungan Hidup baik pada tahap identifikasi resiko dan analisis resiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah *brainstorming* yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

## **BAB II**

### **PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam lima tahun mendatang memiliki tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
3. Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH;

memiliki 2 (dua) sasaran:

1. Terkendalinya Kualitas Air dan Udara;
2. Meningkatnya Pelayanan Persampahan;
3. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor;
4. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan.

Untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor menetapkan Program dan kegiatan didalam Rencana Kerja tahun 2023 sebanyak 11 program dan 18 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
  - a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
    - 2) Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
    - 3) Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
    - 4) Penyediaan Sarana Persampahan
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota



- 1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota
  - 2) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
    - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
    - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
  - a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
    - 1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
  - a. Penyimpanan Sementara Limbah B3
    - 1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  - a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
  - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
    - 2) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
    - 3) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
  - a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
  - a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
    - 1) Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
10. Program Pengelolaan Persampahan
  - a. Pengelolaan Sampah
    - 1) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
    - 2) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
    - 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

## 11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan/ masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana armada pengangkut sampah

3. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan
4. Ketidaktaatan pelaku usaha/usaha terhadap peraturan lingkungan hidup

Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh masing-masing Atasan Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diidentifikasi bahwa belum semua kegiatan DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR PENGELOLAAN RISIKO (RISK MANAGEMENT) 9 berorientasi pada hasil, tepat waktu, tepat mutu, ketaatan terhadap aturan serta kepuasan stakeholders.

Dengan kondisi yang ada pada saat ini maka harapan 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- ✓ Terselenggaranya Sosialisasi pengelolaan Lingkungan Hidup.
- ✓ Tersedianya sarana dan Prasarana untuk pengelolaan persampahan.
- ✓ Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaku/kegiatan usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup.
- ✓ Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
- ✓ Adanya Penambahan Sumber Daya Manusia
- ✓ Melakukan Pembinaan/Sosialisasi kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah;

Keadaan secara manajerial menurut teori SWOT:

#### 1. Faktor Internal

##### a. Strength (Kekuatan)

- Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Organisasi Perangkat Daerah dan perubahannya serta dukungan kelembagaan dan dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
- Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup
- Sumber daya manusia

- Sarana dan prasarana yang tersedia
  - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah berhasil meraih sertifikat SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dari 2022
- b. Weakness (Kelemahan)
- Indeks Reformasi Birokrasi belum optimal
  - Belum optimalnya penggunaan sistem pelaporan dan tindak lanjut terintegrasi melalui sistem manajemen informasi manajemen hasil pengawasan

2. Faktor Eksternal

- a. Opportunities (Peluang)
- b. Terbitnya berbagai regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Threats (Tantangan)
- Tuntutan dari masyarakat
  - Tuntutan dari pengambil kebijakan
  - Kompleksitas pekerjaan dan perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM Lingkungan Hidup.
  - Masih adanya potensi penyalahgunaan penyedia barang/jasa.

**B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN**

Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel : 2.1

Strategi	Arah Kebijakan
1. Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	1) Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh

	2) Pengurangan penggunaan Plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional
2. Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar
3. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan (open government
	Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan 'smart'
	Membangun standarisasi kualitas pelayanan public dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai
	Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
4. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Mendorong percepatan pembangunan kota Bogor yang Cerdas (Bogor smart City) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat

Hasil penilaian awal dari survei persepsi penilaian lingkungan pengendalian intern adalah dapat dilihat pada tabel II.1 .

**Tabel II.2. : REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
<b>a</b>	<b>B</b>	<b>c</b>							<b>d</b>
<b>A.</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>	<b>MEMADAI</b>							
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	3	3	3	2	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	4	3	3	2	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	4	2	3	4	2	3	Memadai
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>	<b>MEMADAI</b>							
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	2	3	2	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	3	3	2	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	3	2	3	3	3	3	Memadai

4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	2	2	3	Memadai
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	2	3	2	3	3	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	2	3	3	4	3	2	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	4	2	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD ( <i>cascading</i> )	4	3	3	4	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	3	3	3	2	3	3	Memadai
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	4	3	4	4	3	3	Memadai



2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	3	2	3	4	4	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	2	4	3	3	Memadai
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	4	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodic	2	3	3	3	3	4	3	Memadai
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>								<b>Cukup MEMADAI</b>
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	3	3	2	2	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	1	4	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	2	3	2	2	Kurang Memadai

5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	2	2	2	4	3	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	2	2	1	3	2	2	Kurang Memadai
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodic	3	3	3	4	3	4	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	2	3	3	4	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

Berdasarkan hasil kuisioner internal di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor secara umum lingkungan pengendalian internal perangkat daerah telah memadai sebagaimana tercantum dalam table 2.1 berikut :

**Tabel 2.3 : Pemetaan Lingkungan Pengendalian**

No	Lingkungan Pengendalian	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<i>Memadai</i>
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	<i>Memadai</i>
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	<i>Memadai</i>
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	<i>Memadai</i>
5.	Pendelegasian Wewenang dan tanggungjawab yang tepat	<i>Memadai</i>
6.	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	<i>Cukup Memadai</i>
7.	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	<i>Memadai</i>
8.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	<i>Memadai</i>

### **C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Untuk meningkatkan perbaikan lingkungan pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, beberapa rencana perlu dilaksanakan. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna

mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atau kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Berdasarkan kepada hasil evaluasi terhadap lingkungan pengendalian risiko saat ini di Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor, Tabel 2.2 berikut menampilkan rencana perbaikan lingkungan pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

**Tabel 2.4 : Rencana Perbaikan Lingkungan pengendalian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.**

NO.	SUB UNSUR	RENCANA TINDAK PERBAIKAN/PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
1.	Penegakkan Integritas dan Nilai Etika	Mengupdate Pakta Integritas sesuai dengan susunan organisasi yang berlaku
		Menyusun kode etik di tingkat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan mengkomunikasikannya dengan karyawan di perangkat daerah
		Membentuk divisi yang khusus menangani pengaduan, melaporkan berkala, mengevaluasi, dan memberikan saran tindak lanjut kepada Kepala perangkat daerah
		Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
		Menyusun time line untuk

2	Komitmen terhadap kompetensi	pelatihan/pendidikan pegawai untuk meningkatkan kompetensi
		Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk pengelolaan risiko secara berkala (setiap semester)
		Menempatkan pegawai sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Pimpinan Instansi menetapkan dan mengartikulasikan secara jelas tujuan pengendalian internal bagi seluruh pegawai
		Menetapkan visi dan misi dinas untuk mendukung Renstra dinas dan mengkomunikasikannya dengan karyawan
<b>NO.</b>	<b>SUB UNSUR</b>	<b>RENCANA TINDAK PERBAIKAN/PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN</b>
		Melaksanakan briefing secara berkala untuk melaksanakan sosialisasi sekaligus evaluasi atas kinerja berbasis risiko
4	Pembentukan Struktur Organisasi sesuai yang dibutuhkan	Memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab pimpinan masing-masing pejabat
		Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang urusan yang didelegasikan
5	Pendelegasian wewenang dan	Mengevaluasi kriteria pendelegasian wewenang

	tanggungjawab yang tepat	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Menetapkan kebijakan SDM yang mendemonstrasikan komitmen integritas, etika, dan kompetensi, melalui penciptaan iklim persaingan yang sehat dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan Melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan yang telah di buat di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
7	Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif	Melaporkan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ke Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai Pembina Pengawasan Risiko Menindaklanjuti temuan dan saran dari APIP dalam rangka peningkatan kualitas perangkat daerah
8	Hubungan Kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Membangun komunikasi yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi Pengawasan/Pemeriksaan

Selain itu untuk meningkatkan perbaikan lingkungan pengendalian diperlukan strategi dimana Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan rencana strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki

lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan resiko yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh
2. Pengurangan penggunaan Plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional
3. Penerapan dan Pengelolaan 3R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat
4. Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah
5. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar
6. Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane
7. Konservasi sumberdaya Air secara berkelanjutan
8. Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi SDA
9. Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air
10. Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air
11. Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air
12. Pengembangan Transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber pencemar udara
13. Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara
14. Penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
15. Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang diteapkan sebagai kawasan



perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat tata ruang

## **BAB III**

### **PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

#### **A. Penetapan Konteks/Tujuan**

Penilaian Resiko adalah proses yang meliputi identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko yang dihadapi manajemen, yang mengganggu pencapaian sasaran pengendalian internal.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi jangka menengah, yang mana Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

#### Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

#### Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under-standing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

#### Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan paparan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut misi yang terkait dengan urusan pemerintahan urusan lingkungan hidup adalah misi ke 1 Mewujudkan Kota Bogor yang sehat dan Misi 2 Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas.

Adapun Tujuan dari misi 1 adalah terwujudnya masyarakat yang sehat dan lingkungan yang berkualitas

Mengacu kepada kerangka di atas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi terkait khusus urusan Lingkungan Hidup, serta, berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas LH Kota Bogor, memfokuskan kepada pencapaian dua tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah di atas, yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana diterjemahkan dalam bidang lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air dan udara, melalui Indikator Kinerja Organisasi: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas yang menjadi tupoksi Dinas LH ditetapkan ada 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase reduksi sampah.

3. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air.

#### 4. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara adalah Indeks Kualitas udara.

#### 5. Meningkatkan Kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 9 (Sembilan) program yaitu : (1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, (3) Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3), (4) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH, (5) Program Peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, (6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, (7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, (8) Program Pengelolaan Persampahan dan (9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Adapun Tujuan dari misi 2 adalah :

Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 2 (dua) melalui 2 (dua) program yaitu (1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dan lingkungan, (2) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tujuan dan Sasaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dapat dilihat pada **tabel 1**.

**Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	CAPAIAN			TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat</b>										
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	<b>Tujuan :</b> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	NA	NA	55,45	54,53	51,37	52,35	54,53
		<b>Sasaran :</b> Indeks Kualitas Air	Point	49,60	51,67	56,33	49,70	36,17	37,17	38,17
		<b>Sasaran :</b> Indeks Kualitas Udara	Point	85,86	81,76	80,09	86,00	79,63	79,72	79,81
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	<b>Sasaran :</b> Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	%	73,00	74,37	74,00	74,50	77,0	77,5	78,0
		<b>Sasaran :</b> Persentase Reduksi Sampah	%	6,30	6,89	7,61	6,60	6,8	7,0	7,2
<b>Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas</b>										
Tujuan 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	<b>Tujuan :</b> Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Poin	B	BB	BB	BB	A	A	A
		<b>Sasaran :</b> Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	NA	NA	NA	NA	80,01	81	82
<b>Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera</b>										
Tujuan 3 : Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	<b>Tujuan :</b> Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100
		<b>Sasaran :</b> Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100

## B. KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Dalam Penilaian Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, perlu dilakukan kriteria penilaian risiko. Penilaian Risiko dilakukan dengan menilai terhadap risiko dampak dan kemungkinan terjadinya risiko seperti pada table berikut :

## 1. Kerangka Kemungkinan/Probabilitas

Kerangka kemungkinan didasarkan pada frekuensi kemungkinan risiko tersebut terjadi dengan skala risiko kemungkinan sebagai berikut :

No.	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Jarang Sekali	Kecil Kemungkinan Tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari 0	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang daripada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

## 2. Kerangka Dampak

Kerangka Dampak didasarkan kepada seberapa besar dampak yang akan terjadi jika risiko tidak dikendalikan. Skala Dampak ditampilkan pada table berikut :

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah Sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/ organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/ organisasi secara cukup signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4



### 3. Skala Risiko

Matrik risiko yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor adalah 4 x 4 dengan deskripsi sebagai berikut :

Matriks Analisa Resiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak Signifikan	Kecil	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan terjadinya Resiko	Hampir Pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				

Keterangan

<b>HIGH RISK</b>	<b>MEDIUM HIGH</b>	<b>MEDIUM LOW</b>	<b>LOW</b>
----------------------	------------------------	-----------------------	------------

Dari hasil penilaian internal yang dilakukan oleh Tim Penilai di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, terdapat 86 Risiko dari satu urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Secara umum risiko yang teridentifikasi masuk kedalam kategori Medium High dengan jumlah sebanyak 62 Risiko dan 19 Risiko Kategori Risiko Tinggi pada Urusan Bidang Lingkungan Hidup.

Rekapitulasi Risiko yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dapat dilihat pada tabel 3.2. Untuk selanjutnya risiko yang akan dibahas dan ditindak lanjuti hanya risiko yang berada pada level *High Risk* dan dibahas.

**Tabel 3.2 : Rekapitulasi Risiko Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor**

No	Tipe Risiko	Jumlah Risiko
		Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
<b>A.</b>	<b>Risiko Strategis</b>	
1	Low Risk	-
2	Medium Risk	-
3	Medium High	7
4	High Risk	2
	<b>Total Risiko</b>	<b>9</b>
<b>B.</b>	<b>Risiko Operasional</b>	
1	Low Risk	-
2	Medium Risk	5
3	Medium High	55
4	High Risk	17
	<b>Total Risiko</b>	<b>77</b>

**Tabel III.2. Penetapan Konteks Resiko Startegis**

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Bogor		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2019-2024		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Lingkungan Hidup		
PD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup		
Sumber Data	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup		
Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor</li> <li>3. Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH</li> </ol>		
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkendalinya Kualitas Air dan Udara</li> <li>2. Meningkatnya Pelayanan Persampahan</li> <li>3. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor</li> <li>4. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan</li> </ol>		
Program Dinas Lingkungan Hidup (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li> <li>2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li> <li>3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)</li> <li>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li> <li>7. Program Pengelolaan Persampahan</li> <li>8. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> <li>9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li> <li>10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>11. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> </ol>		
IKU Renstra Perangkat Daerah		<b>IKU</b>	<b>2024</b>
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH ) Kabupaten / Kota	54,532
	2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten / Kota	75,5
	3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan , ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	39

**Tabel III.3. Penetapan Konteks Resiko Operasional**

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Bogor		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun 2019-2024		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Lingkungan Hidup		
PD yang Dinilai	: Dinas Lingkungan Hidup		
Sumber Data	Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022		
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
	2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor		
	3. Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH		
Sasaran Strategis	1. Terkendalinya Kualitas Air dan Udara		
	2. Meningkatnya Pelayanan Persampahan		
	3. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor		
	4. Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan		
Keluaran/Hasil Kegiatan	<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>
	1.	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	%
	2.	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	%
	3.	Persentase sekolah Adiwiyata	%
	4.	Indeks Kualitas Air	Point
	5.	Indeks Kualitas Udara	Point
	6.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%
	7.	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Ha
	8.	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	%
	9.	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	%
	10.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	%
	11.	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	%
	12.	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	%
	13.	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	%
	12.	Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	%
	13.	Persentase Reduksi Sampah (%)	%
	14.	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	%
	15.	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	%
	16.	Persentase peningkatan retribusi persampahan	%
17.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Point	
18.	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat daerah	Point	
19.	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	%	

Program, Kegiatan, dan Keluaran/ Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan</li> <li>- Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup</li> </ul>
	<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup</li> </ul>
	<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu</li> <li>- Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu</li> <li>- Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan /usaha</li> <li>- Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan</li> </ul>
	<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi</li> </ul>
	<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyimpanan Sementara Limbah B3</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3</li> </ul>
	<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kegiatan dan/ atau Usaha berizin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehubungan atas ketaatan terhadap dokumen dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan</li> </ul>

	<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti</li> </ul>
	<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan</li> </ul>
	<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Sampah</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Sampah</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R</li> <li>- Presentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah</li> <li>- Persentase Volume sampah terangkut ke TPA</li> </ul>
	<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik</li> </ul>
	<p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Lingkungan Hidup</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Dokumen KLHS yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>

### **C. Hasil Identifikasi Risiko**

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan atau sasaran beserta indikatornya diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Tahapan proses merupakan tahap umum sesuai dengan proses bisnis dari suatu aktifitas yang akan dinilai risikonya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan atau sasaran dan indikatornya.

Resiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko atau sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Hasil identifikasi Resiko Strategis dan Resiko Operasional Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam table dibawah ini :

**Tabel III.4 Identifikasi Resiko Strategis**

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Bogor									
Nama OPD		: Dinas Lingkungan Hidup									
Tahun Penilaian		: 2023									
Periode yang dinilai		: Periode Renstra (Tahun 2019-2024)									
Urusan Pemerintahan		: Urusan Lingkungan Hidup									
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara	Berkurangnya peran aktif dari masyarakat/Kelompok/Kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	RSO. 01.11.01	Kepala Bidang TL	Menurunnya kepedulian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Eksternal	C	Lingkungan menjadi kotor dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit	DLH Masyarakat	
			Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	RSO. 01.11.02	Kepala Bidang TL	Tingkat pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup masih rendah	Eksternal	C	Terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat/pelaku usaha di Kota Bogor dan tidak tersosialisasikannya pengelolaan lingkungan hidup	DLH Masyarakat	
			Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian dan peternakan	RSO. 01.11.03	Kepala Bidang PPLKPI	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan/ masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Eksternal	C	Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kota Bogor	DLH Masyarakat	
			Menurunnya kualitas udara ambien;	RSO. 01.11.04	Kepala Bidang PPLKPI	Semakin banyaknya aktivitas kendaraan bermotor di jalan raya	Eksternal	C	Menurunnya kesehatan masyarakat	DLH Masyarakat	
			Meningkatnya emisi gas rumah kaca;	RSO. 01.11.05	Kepala Bidang PPLKPI	Meningkatnya gas emisi dari asap kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik	Eksternal	C	Meningkatnya rata-rata suhu permukaan bumi	Masyarakat	
	Sasaran Strategis OPD : Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota.	RSO. 01.11.06	Kabid Pengelolaan persampahan	Masyarakat belum melakukan pemilah sampah di sumber	Internal	C	Semakin banyaknya timbunan sampah yang diangkut ke TPA	DLH, Masyarakat	
			Persentase Reduksi Sampah	Tidak maksimal nya PAD Kota Bogor dari Sektor Retribusi Persampahan	RSO. 01.11.07	Kabid Pengelolaan persampahan	Berkurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam pembayaran retribusi sampah	Internal	C	Berkurangnya retribusi sampah yang masuk ke kas negara	DLH, Masyarakat
			Tidak terangkutnya sampah ke TPA Galuga	RSO. 01.11.08	Kabid Pengelolaan persampahan	Terbatasnya sarana dan prasarana armada pengangkut sampah	Internal	C	Menumpuknya Sampah di tempat-tempat penampungan sampah sementara dan/atau TPS Container	DLH, Masyarakat	



			Sistem Penutupan sampah dengan lapisan tanah (control Landfill) tidak dapat dilaksanakan	RSO. 01.11.09	Kabid Pengelolaan persampahan	Terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia di TPA	Internal	C	Akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang semakin besar (dampak sosial dan kesehatan masyarakat), karena sampah yang dibuang ke TPA akan mencemari tanah, air dan udara akibat tidak terkelolanya sampah di TPA	DLH, Masyarakat
2	Tujuan: Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas	RSO. 01.11.10	DLH	Kurangnya Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana dan anggaran untuk operasional perangkat daerah	Internal	C	Tidak optimalnya tugas Pelayanan Lingkup Dinas Lingkungan Kota Bogor	DLH
	Sasaran Strategis OPD : Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan		Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang di laporkan oleh DLH tidak sesuai dengan format yang telah di tetapkan	RSO. 01.11.11	DLH	Kurang memahami format yang telah disampaikan	Internal	C	pelaporan terhambat karena tidak bisa di rekapitulasi dan tidak lengkap	DLH
3	Tujuan: Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH	Persentase Data dan Informasi SDA dan LH yang dapat di akses oleh Public secara mudah dan berkualitas	Masyarakat tidak dapat mengetahui dan/atau mengakses informasi terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor	RSO. 01.11.12	DLH	Tidak adanya data terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Internal	C	Tidak maksimalnya perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup	DLH, Masyarakat
	Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan									

**Tabel III.5 Identifikasi Resiko Operasional**

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Bogor													
Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup													
Tahun Penilaian : 2023													
Periode yang dinilai : 2023													
Ususan Pemerintahan : Ususan Lingkungan Hidup													
No	Tujuan Strategis / Sasaran Strategis	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sub Kegiatan)	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
				Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
						Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup												
	Sasaran Strategis OPD : Terkendalinya Kualitas Air dan Udara												
	Program : Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Perencanaan	kurangnya jumlah sekolah yang diusulkan sebagai calon sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.01	Kabid Tata Lingkungan	Tidak banyak sekolah memenuhi kriteria calon sekolah Adiwiyata	Eksternal	C	Kota Bogor tidak dapat mengirim sekolah yang diikutsertakan sebagai sekolah Adiwiyata	DLH, Sekolah	
				Pelaksanaan	Sekolah belum optimal menerapkan semua kriteria sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.02	Kabid Tata Lingkungan	Keterbatasan SDM	Eksternal	C	Jumlah mengikuti sekolah adiwiyata berkurang	DLH, Sekolah	
				Evaluasi	Ketidaksiapan sekolah mengikuti Adiwiyata	ROO.01.11.03	Kabid Tata Lingkungan	Kurangnya dukungan sekolah	Eksternal	C	Tidak tercapai target RPJMD	DLH, Sekolah	
	Program : Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Insitusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Perencanaan	Kurang sesuai materi dengan kondisi masyarakat	ROO.01.11.04	Kabid Tata Lingkungan	Kebutuhan masyarakat yang berbeda	Internal	C	Kurangnya daya tarik masyarakat untuk mengikuti bintek	DLH, Masyarakat	

		Pelaksanaan	Kurangnya minat peserta	ROO.01.11.05	Kabid Tata Lingkungan	Materi kurang menarik minat masyarakat	Internal	C	Jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya tidak sesuai target	DLH, Pelaku usaha/kegiatan
		Evaluasi	Kurangnya pemahaman terhadap materi	ROO.01.11.06	Kabid Tata Lingkungan	Kurangnya pengalaman masyarakat	Internal	C	Kesadaran masyarakat tidak meningkat	DLH, Pelaku usaha/kegiatan
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan BerbudayaLingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Perencanaan	Adanya ketidakhadiran pelaku usaha untuk pengurusan dokumen lingkungan untuk penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha	ROO.01.11.07	Kabid Tata Lingkungan	Masih belum Sinkronnya peraturan terkait lingkungan hidup dan perizinan berusaha	Internal	C	Pelaku usaha/Kegiatan tidak menyusun Dokumen Lingkungan saat mengajukan persyaratan perizinan berusaha	DLH, Pelaku usaha/kegiatan
		Pelaksanaan	Pelaku usaha/kegiatan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang disyaratkan di dokumen lingkungan	ROO.01.11.08	Kabid Tata Lingkungan	Pelaku usaha/kegiatan belum memahami isi dokumen lingkungan	Eksternal	C	Terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	DLH, Pelaku usaha/kegiatan
		Evaluasi	Ketidaksesuaian dokumen lingkungan yang harus disusun oleh pelaku usaha/kegiatan	ROO.01.11.09	Kabid Tata Lingkungan	Mereka kesulitan dalam menentukan jenis dokumen yang harus disusun	Eksternal	C	Dokumen lingkungan yang disusun tidak sesuai dengan yang disyaratkan sehingga persetujuan lingkungan tidak dapat dikeluarkan	DLH, Pelaku usaha/kegiatan
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Pelaksanaan	Peringatan hari besar tidak dilaksanakan	ROO.01.11.10	Kabid Tata Lingkungan	Kurangnya persiapan panitia dalam penyusunan materi acara	Eksternal	C	Tidak ada peringatan hari besar lingkungan hidup	DLH, Masyarakat
		Pelaksanaan	Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti peringatan hari besar lingkungan hidup	ROO.01.11.11	Kabid Tata Lingkungan	Kegiatan yang dikemas kurang menarik	Internal	C	Peserta kegiatan menjadi berkurang	DLH, Masyarakat
		Evaluasi	Pelaksanaan hari besar lingkungan hidup tidak optimal	ROO.01.11.12		Materi pelaksanaan hari besar lingkungan tidak sesuai dengan tema	Internal	C	Edukasi terhadap masyarakat kurang optimal	DLH, Masyarakat

Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Perencanaan	Tidak terlaksananya pengujian sesuai dengan musim	ROO.01.11.13	Kabid PPLKPI	Cuaca yang tidak menentu	Eksternal	C	Pelaksanaan pekerjaan terhambat	DLH, Masyarakat
			Pelaksanaan	Lokasi Pengujian Sulit di capai	ROO.01.11.14		Lokasinya menurun tebing dan melewati tanah kosong	Internal	C	Pengambilan sample sulit dilakukan	DLH, Masyarakat
			Pelaksanaan	Hasil Pengujian kualitas air dibawah baku mutu	ROO.01.11.15		Kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah yang dibuang ke sungai meningkat serta buangan dari rumah tangga yang masuk ke sungai	Eksternal	C	Kondisi air sungai menjadi tercemar	DLH, Masyarakat
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Kurang Akurat dan Terpercaya terkait hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca	ROO.01.11.16	Kabid PPLKPI	- Ketersediaan Data yang diperlukan belum optimal - Misinterpretasi dalam metode perhitungan yang digunakan dalam penyusunan dokumen - Belum adanya Petunjuk teknis di beberapa sektor dalam perhitungan inventarisasi - Perbedaan asumsi yang digunakan dalam penyusunan dokumen kajian	Internal	C	Kurang Terkendalinya sumber sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan	DLH, Masyarakat
	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi									
			Pelaksanaan	Laporan hasil kajian Rehabilitasi lahan dan konservasi di DAS Cisadane kurang tajam	ROO.01.11.17		Tenaga ahli yang kurang kompeten dan kurangnya data-data	Internal	C	laporan hasil kajian tidak maksimal	DLH, Masyarakat

Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Perencanaan	Tidak Teridentifikasi nya timbunan sampah spesifik rumah tangga di Kota Bogor	ROO.01.11.18	Kabid PPLKPI	Belum ada data (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	Internal	C	Pencemaran lingkungan langsung maupun tidak langsung	DLH, Masyarakat
			Pelaksanaan	Lamanya waktu pengumpulan data timbunan sampah spesifik rumah tangga (Sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.19	Kabid PPLKPI	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sampah spesifik rumah tangga	eksternal	C	menurunnya kesehatan masyarakat	DLH, Masyarakat
			Evaluasi	Meningkatnya jumlah timbunan sampah spesifik rumah tangga (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.20	Kabid PPLKPI	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait jenis sampah yang masuk ke dalam sampah spesifik rumah tangga	Internal	C	Terjadinya penumpukan sampah spesifik rumah tangga yang belum dipilah	DLH, Masyarakat
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPHL yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan	Banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki perizinan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.01.11.21	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Adanya temuan ketidakpatuhan pelaku usaha/kegiatan terhadap kewajiban yang ada di peaturan perundangan lingkungan	Eksternal	C	Pelaku usaha/Kegiatan dalam menjalankan kegiatan usahanya melanggar perizinan lingkungan	DLH, Pelaku usaha/kegiatan
			Pelaksanaan	Adanya pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha	ROO.01.11.22	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Pelaku usaha/Kegiatan kurang mendapat informasi terkait peraturan tata cara pengelolaan izin lingkungan	Internal	C	Kegiatan/usaha tidak memiliki perizinin lingkungan	DLH, Pelaku usaha/kegiatan
			Pelaksanaan	Pelaku usaha/kegiatan tidak memiliki dokumen lingkungan	ROO.01.11.23	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Ketidaktaatan pelaku usaha/usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	Eksternal	C	Pelaku usaha/Kegiatan dalam menjalankan kegiatan usahanya melanggar perizinan lingkungan	DLH, Pelaku usaha/kegiatan
			Evaluasi/Pelaporan	Tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha/kegiatan dalam ketaatan perizinan lingkungan	ROO.01.11.24	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Dokumen perizinan lingkungan disamakan dengan perizinan yang lainnya	Eksternal	C	Meningkatnya pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan/usaha	

Program: Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Perencanaan	Jumlah pengaduan masyarakat belum diketahui	ROO.01.11.25	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Banyaknya pengaduan terkait pencemaran lingkungan yang masuk	Internal	C	Terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	DLH, Pelaku usaha/kegiatan dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Meningkatnya jumlah pengaduan lingkungan hidup	ROO.01.11.26	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Eksternal	C	Semakin banyaknya pengaduan lingkungan hidup yang masuk dan mengakibatkan tidak terselesaikannya pengaduan lingkungan hidup	DLH, Pelaku usaha/kegiatan dan Masyarakat
			Evaluasi/Pelaporan	Tidak terkendalinya sumber Pencemar	ROO.01.11.27	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya Pencemaran Lingkungan Hidup	Eksternal	C	Tidak terkendalinya Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	DLH, Pelaku usaha/kegiatan dan Masyarakat
Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Perencanaan	Penentuan titik lokasi penanaman yang sesuai kriteria semakin sulit di dapatkan	ROO.01.11.28	Kabid PPLKPI	- Belum tersedianya data terkait lokasi penanaman yang mutakhir - Banyak terjadi perubahan fungsi lahan	Internal	C	tidak meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	Kepala DLH, Masyarakat
			Pelaksanaan	Pohon yang di tanam di daerah konservasi mati/kening	ROO.01.11.29		kurangnya perhatian dari petugas pemelihara pohon	Internal	C	Pemeliharaan pohon tidak berjalan dengan baik	
	Sasaran Strategis : Meningkatnya Pelayanan Persampahan										
Program : Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan : Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Perencanaan	Belum tercukupinya pemeliharaan sarana dan prasarana di TPS 3R	ROO.01.11.30	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Banyaknya sarana dan prasarana TPS 3R yang mengalami kerusakan	Internal	C	Belum optimal dalam pemilahan sampah	DLH, Masyarakat
			Pelaksanaan	Tidak dihasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah di TPS 3R	ROO.01.11.31	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Tidak ada sarana pengelompokan sampah organik dan non organik	Eksternal	C	Tercampurnya sampah organik dan organik di TPS 3R	DLH, Masyarakat
			Evaluasi/Pelaporan	Masih tercampurnya sampah organik dan non organik dari sumber	ROO.01.11.32	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Kurangnya edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah dari rumah	Internal	C	Sampah masih belum terpilah	DLH, Masyarakat

	Kegiatan : Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Ditolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Perencanaan	Kendaraan Pengangkut sampah Rusak	ROO.01.11.33	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Tidak terpeliharanya kendaraan kendaraan operasional pengangkut sampah dan umur kendaraan pengangkut sampah yang sudah tua	Internal	C	Kendaraan tidak bisa dipakai untuk mengangkut sampah	DLH, Masyarakat
			Pelaksanaan	Tidak terangkutnya sampah	ROO.01.11.34	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Armada kendaraan pengangkut sampah Rusak	Internal	C	Terjadinya pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah di TPS	DLH, Masyarakat
			Pelaksanaan	Petugas Kebersihan pengangkut sampah terkena penyakit	ROO.01.11.35	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Sampah yang menumpuk di Truk dan asap kendaraan bermotor di jalanan	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan pengangkutan sampah	DLH, Masyarakat
			Evaluasi	Terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS	ROO.01.11.36	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Kendaraan pengangkut sampah yang rusak (mogok)	Internal	C	terjadi pencemaran lingkungan (sampah di TPS di hinggap alat) dan	DLH, Masyarakat
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Perencanaan	Adanya gagal lelang pekerjaan konsultasi perencanaan	ROO.01.11.37	Kepala UPTD TPA Galuga	Banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria	Eksternal	C	Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan	DLH, Masyarakat
			Pelaksanaan	Adanya Keterlambatan dalam pengerjaan Controll Landfill	ROO.01.11.38	Kepala UPTD TPA Galuga	Curah hujan tinggi dan terkendala kurangnya alat berat	Internal	C	Pekerjaan akan menjadi bertambah lama tidak sesuai target yang telah ditetapkan serta dapat mengganggu lingkungan.	DLH, Masyarakat
Program : Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Perencanaan	Titik lokasi pembangunan TPS belum jelas	ROO.01.11.39	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Tidak tersedia data	Internal	C	Terhambatnya pekerjaan pembangunan TPS	DLH, Masyarakat
			Pelaksanaan	Keterlambatan waktu pekerjaan pembangunan	ROO.01.11.40	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Lahan aset Pemkot terbatas	Eksternal	C	Pekerjaan Pembangunan TPS melewati jadwal yang telah ditentukan	DLH, Masyarakat
			Evaluasi	Penumpukan Timbulan sampah di TPS	ROO.01.11.41	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Karena volume sampah melebihi kapasitas daya tampung TPS	Eksternal	C	Mencemari lingkungan sekitar TPS	DLH, Masyarakat
	Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	umlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	Perencanaan	Rehabilitasi TPS belum bisa dilaksanakan	ROO.01.11.42	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Kurangnya ada data TPS rusak	Internal	C	TPS yang ada tidak bisa menampung sampah yang masuk	DLH, Masyarakat
			Pelaksanaan	Keterbatasan SDM dalam pengerjaan rehabilitasi TPS	ROO.01.11.43	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	SDM yang ada adalah petugas kebersihan	Internal	C	Tidak tercapainya target rehabilitasi TPS	DLH, Masyarakat
			Evaluasi	TPS tidak dapat digunakan untuk menampung sampah	ROO.01.11.44	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	TPS mengalami kerusakan	Internal	C	Masyarakat tidak dapat membuang sampah ke TPS	DLH, Masyarakat
	Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Perencanaan	Adanya alat berat yang tidak dapat diperbaiki	ROO.01.11.45	Kepala UPTD TPAS GALUGA	Kerusakan masing-masing alat berat tidak sama	Internal	C	Terhambatnya pengelolaan sampah di TPA di Galuga	DLH, Masyarakat
			Pelaksanaan	Pada saat pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba alat berat rusak	ROO.01.11.46	Kepala UPTD TPAS GALUGA	Umur Alat Berat di TPA Galuga sudah tua	Internal	C	Terhambatnya pengelolaan sampah di TPA di Galuga	DLH, Masyarakat
			Evaluasi	Pengelolaan sampah di TPA di Galuga tidak dapat dilaksanakan	ROO.01.11.47	Kepala UPTD TPAS GALUGA	Pada saat pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba alat berat rusak	Internal	C	Timbulan sampah menumpuk	DLH, Masyarakat

	Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	Perencanaan	Adanya gagal lelang pekerjaan penyediaan barang	ROO.01.11.48	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria	Eksternal	C	Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan	DLH, Masyarakat	
			Pelaksanaan	Terjadinya Kecelakaan kerja pada saat petugas kebersihan menyapu jalan	ROO.01.11.49	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Kendaraan yang melintas tidak berhati-hati dan petugas penyapu tidak memperhatikan SOP penyapuan jalan	Eksternal	C	Pelaksanaan penyapuan menjadi terhambat	DLH, Masyarakat	
			Pelaksanaan	Adanya keterlambatan proses pekerjaan	ROO.01.11.50	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Keterlambatan Pengiriman bahan baku	Internal	C	Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan	DLH, Masyarakat	
2	Tujuan Strategis : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor											
	Sasaran Strategis : Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)										
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan	Kekurangan Tenaga ASN DLH	ROO.01.11.51	Sekretaris Dinas	keterlambatan dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi Tupoksi	Internal	C	Tidak terlaksananya tugas Pelayanan Lingkup Dinas Lingkungan Kota Bogor	DLH
				Pelaksanaan	Tidak terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	ROO.01.11.52	Sekretaris Dinas	Pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan telat	Internal	C	ASN tidak bekerja secara optimal	DLH
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	Tidak memiliki data evaluasi kinerja	ROO.01.11.53	Sekretaris Dinas	Belum ada data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh BPS atau Disdukcapil	Internal	C	Tidak bisa melakukan perhitungan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah	DLH	
			Pelaksanaan	Analisis data capaian kinerja tidak tajam	ROO.01.11.54	Sekretaris Dinas	Kurangnya kompetensi Sumber daya manusia untuk menyusun laporan	Internal	C	Laporan tidak akuntabel dan transparan	DLH	
			Evaluasi	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja	ROO.01.11.55	Sekretaris Dinas	Kurangnya kordinasi dengan bidang-bidang	Internal	C	Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaporkan dengan baik	DLH	
			Pelaporan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dapat selesai tepat waktu	ROO.01.11.56	Sekretaris Dinas	data Base yang masih kurang	Internal	C	Perangkat daerah tidak memiliki Dokumen Evaluasi kinerja	DLH	



Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perencanaan	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.57	Sekretaris Dinas	Tidak ada dokumen rincian kebutuhan barang	Internal	C	Terganggunya pekerjaan kantor	DLH
		Pelaksanaan	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.58	Sekretaris Dinas	Persediaan barang habis sehingga satuan harga meningkat	Eksternal	UC	Terganggunya pekerjaan kantor	DLH
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Perencanaan	Tidak Tersedianya Peralatan rumah tangga	ROO.01.11.59	Sekretaris Dinas	Adanya kenaikan harga barang yang melebihi anggaran	Internal	C	Terhambatnya Kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	DLH
		Pelaksanaan	Adanya jumlah kenaikan kebutuhan operasional	ROO.01.11.60	Sekretaris Dinas	Kebutuhan bersifat dinamis dan tidak bisa diprediksi secara akurat	Internal	C	tidak terfasilitasinya serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kantor, sehingga pelaksanaan tupoksi menjadi tidak optimal	DLH
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Perencanaan	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.61	Sekretaris Dinas	Persediaan barang habis sehingga satuan harga meningkat	Internal	C	Terhambatnya Kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	DLH
		Pelaksanaan	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.62	Sekretaris Dinas	Adanya kenaikan harga barang yang melebihi anggaran	Internal	C	tidak terfasilitasinya serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kantor, sehingga pelaksanaan tupoksi menjadi tidak optimal	DLH
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Perencanaan	Kesalahan dalam menentukan jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	ROO.01.11.63	Sekretaris Dinas	Kesulitan dalam memprediksi kebutuhan barang cetak dan penggandaan dalam tahun berjalan	Internal	C	Terhambatnya Kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	DLH
		Pelaksanaan	Barang discontinue (tidak tersedia)	ROO.01.11.64	Sekretaris Dinas	Harga pasar yang fluktuatif dan membutuhkan waktu yang lama	Internal	UC	tidak terfasilitasinya serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kantor, sehingga pelaksanaan tupoksi menjadi tidak optimal	DLH
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan	Kurang tepatnya dalam penyusunan rincian anggaran perjalanan dinas	ROO.01.11.65	Sekretaris Dinas	Agenda kegiatan bersifat perkiraan	Internal	UC	Kegiatan kedinasan tidak terakomodir seluruhnya	DLH
		Penganggaran	Perjalanan dinas tidak dapat dibiayai	ROO.01.11.66	Sekretaris Dinas	Perubahan lokasi kegiatan yang mendadak dan tidak ada alokasi anggaran	Internal	UC	Tidak terlaksananya kegiatan kedinasan	DLH
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan	Adanya jumlah kenaikan pemakaian listrik	ROO.01.11.67	Sekretaris Dinas	Penggunaan listrik yang berlebihan atau tidak hemat energi	Internal	UC	Tidak terbayarkannya beban tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DLH
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Perencanaan	Perekrutan pegawai Non PNS tidak sesuai kualifikasi	ROO.01.11.68	Sekretaris Dinas	Berkas persyaratan calon pegawai yang diterima tidak lengkap	Internal	C	Tidak terpenuhinya tenaga Non PNS/kurangnya SDM yang kompeten	DLH
		Pelaksanaan	Kekurangan anggaran gaji non ASN	ROO.01.11.69	Sekretaris Dinas	Bertambahnya pegawai non ASN	Internal	C	Tidak terbayarkannya gaji non ASN	DLH

	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Perencanaan	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan	ROO.01.11.70	Sekretaris Dinas	Ketelodaran dalam pencatatan masa habis jangka waktu pembayaran pajak kendaraan	Internal	C	Mengakibatkan pembayaran denda	DLH
			Pelaksanaan	Pengadministrasian tidak tepat waktu dan pemeliharaan tidak sesuai perencanaan	ROO.01.11.71	Sekretaris Dinas	Keterbatasan sumber daya yang kompeten dan kemungkinan terjadi kerusakan suku cadang diluar perencanaan	Internal	C	Terlambatnya pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan dan kurang maksimalnya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	DLH
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	Perencanaan	Bertambahnya bangunan gedung kantor yang harus diperbaiki karena terjadinya kerusakan di luar rencana yang sudah ditentukan	ROO.01.11.72	Sekretaris Dinas	Terjadinya hujan lebat yang terus menerus	Eksternal	C	tidak terfasilitasinya serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kantor, sehingga pelaksanaan tupoksi menjadi tidak optimal	DLH
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pelaksanaan	Adanya kerusakan gedung kantor dan bangunan di luar dari rencana pemeliharaan	ROO.01.11.73	Sekretaris Dinas	Adanya faktor alam (bencana & cuaca)	Internal	UC	Penurunan kualitas bangunan/gedung kantor	DLH
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pelaksanaan	Adanya kerusakan prasarana penunjang gedung kantor di luar rencana pemeliharaan	ROO.01.11.74	Sekretaris Dinas	Adanya faktor alam (bencana & cuaca)	Internal	C	Mengurangi estetika gedung kantor	DLH
3	Tujuan Strategis : Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH										
	Sasaran Strategis: Meningkatkan Pendayagunaan Data dan Informatika SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan										
	Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kegiatan : Rencana Perflindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Pelaksanaan	Tidak tersusunnya Kerangka Acuan Kerja yang sesuai dengan pedoman	ROO.01.11.75	Minimnya kompetensi pegawai menyusun kerangka kerja	Internal	C	Hasil kajian tidak optimal	DLH

			Pelaksanaan	Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan upaya yang telah dilakukan Kota Bogor dalam pengelolaan lingkungannya	ROO.01.11.76	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Kurangnya data-data yang diperlukan untuk Penyusunan dokumen	Internal	C	Tidak dapat menjadi sumber informasi dalam menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Bogor	DLH
	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pelaksanaan	Muatan dalam Dokumen KLHS RPJMD tidak lengkap	ROO.01.11.77	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Kurangnya data-data yang diperlukan untuk Penyusunan dokumen	Internal	C	Dokumen KLHS RPJMD kurang implementatif dan tidak sesuai dengan pedoman yang dipersyaratkan	DLH

#### D. Hasil Analisis Resiko

Dalam penilaian resiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kemungkinan dan dampak, serta skala resiko sebagai berikut :

**Tabel III.3. Skala Kemungkinan Terjadinya Resiko**

No	Kriteria Kemungkinan	Definsi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Jarang Sekali	Kecil Kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi Lebih Besar dari Nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
4	Sering Sekali	Kemungkinan terjadi > 50%	4
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

**Tabel III 4. Skala Kemungkinan Terjadinya Dampak**

No	Kriteria Kemungkinan	Definsi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Rendah Sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan	1
2	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara signifikan	2
3	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	3
4	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan	4

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekuensi maka akan diketahui tingkat konsekuensi resiko yang mungkin terjadi.

Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak signifikan akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

Penyusunan Skala Penilaian Risiko yang terdiri dari hasil analisa dampak dan kemungkinan dari resiko berdasarkan hasil dari FGD dari masing-masing bidang serta sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yaitu Pihak-pihak yang terlibat berada pada Bagian Sekretariat, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi, dan Perubahan Iklim, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A. Hasil identifikasi resiko yang dilakukan oleh Sekretariat dan Bidang.

Berdasarkan hasil skala analisis resiko terhadap dampak dan hasil analisis resiko terhadap kemungkinan terlihat bahwa ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan jarang sekali dan jarang pada kegiatan tertentu di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

**Tabel III. 5. Rekapitulasi Daftar Resiko dan Dampak**

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisa Risiko Terhadap Dampak					Rata-rata skor Dampak
			Skor ke.1 Dampak	Skor ke.2 Dampak	Skor ke.3 Dampak	Skor ke.4 Dampak	Skor ke.5 Dampak	
1	2	3	4					5
<b>A</b>	<b>Tujuan Strategis</b>							
	Tujuan Strategis : 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup							
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Berkurangnya peran aktif dari masyarakat/Kelompok/Kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	RSO. 01.11.01	2	1	3	2	3	2,2
2	Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	RSO. 01.11.02	2	2	2	3	1	2
	Tujuan Strategis : 2 Terkendalnya Kualitas Air dan Udara							
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian dan peternakan	RSO. 01.11.01	2	2	2	3	1	2
2	Menurunnya kualitas udara ambien;	RSO. 01.11.02	2	2	2	3	1	2
3	Meningkatnya emisi gas rumah kaca;	RSO. 01.11.03	2	2	2	3	2	2,2

III	Risiko Operasional Perangkat Daerah							
1	Kurangnya jumlah sekolah yang diusulkan sebagai calon sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.01	2	2	3	2	2	2,2
2	Sekolah belum optimal menerapkan semua kriteria sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.02	3	2	2	3	2	2,4
3	Ketidaksiapan sekolah mengikuti Adiwiyata	ROO.01.11.03	3	3	3	3	3	3
4	Kurang sesuai materi dengan kondisi masyarakat	ROO.01.11.04	2	1	1	1	1	1,2
5	Kurangnya minat peserta	ROO.01.11.05	1	1	3	2	1	1,6
6	Kurangnya pemahaman terhadap materi	ROO.01.11.06	1	1	1	1	1	1
7	Adanya ketidakpahaman pelaku usaha untuk pengurusan dokumen lingkungan untuk penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha	ROO.01.11.07	4	3	3	3	3	3,2
8	Pelaku usaha/kegiatan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang disyaratkan di dokumen lingkungan	ROO.01.11.08	4	3	3	4	3	3,4
9	Ketidaksesuaian dokumen lingkungan yang harus disusun oleh pelaku usaha/kegiatan	ROO.01.11.09	2	2	2	3	2	2,2
10	Peringatan hari besar tidak dilaksanakan	ROO.01.11.10	2	1	2	2	2	1,8
11	Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti peringatan hari besar lingkungan hidup	ROO.01.11.11	2	2	3	1	1	1,8
12	Pelaksanaan hari besar lingkungan hidup tidak optimal	ROO.01.11.12	3	2	2	2	2	2,2
13	Tidak terlaksananya pengujian sesuai dengan musim	ROO.01.11.13	3	4	2	3	2	2,8
14	Lokasi Pengujian Sulit di capai	ROO.01.11.14	3	1	2	2	1	1,8
15	Hasil Pengujian kualitas air dibawah baku mutu	ROO.01.11.15	3	2	2	3	2	2,4
16	Kurang Akurat dan Terpercaya terkait hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca	ROO.01.11.16	3	1	2	2	2	2

17	Laporan hasil kajian Rehabilitasi lahan dan konservasi di DAS Cisadane kurang tajam	ROO.01.11.17	3	2	2	2	2	2,2
18	Tidak Teridentifikasi nya timbunan sampah spesifik rumah tangga di Kota Bogor	ROO.01.11.18	3	1	2	1	2	1,8
19	Lamanya waktu pengumpulan data timbunan sampah spesifik rumah tangga (Sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.19	1	1	2	2	2	1,6
20	Meningkatnya jumlah timbunan sampah spesifik rumah tangga (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.20	3	2	2	2	2	2,2
21	Banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki perizinan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.01.11.21	3	2	2	2	2	2,2
22	Adanya pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha	ROO.01.11.22	3	3	2	3	4	3
23	Pelaku usaha/kegiatan tidak memiliki dokumen lingkungan	ROO.01.11.23	2	1	2	1	2	1,6
24	Tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha/kegiatan dalam ketaatan perizinan lingkungan	ROO.01.11.24	3	2	2	2	2	2,2
25	Jumlah pengaduan masyarakat belum diketahui	ROO.01.11.25	3	2	2	2	2	2,2
26	Meningkatnya jumlah pengaduan lingkungan hidup	ROO.01.11.26	3	2	2	2	2	2,2
27	Tidak terkendalinya sumber Pencemar	ROO.01.11.27	2	1	2	2	2	1,8
28	Penentuan titik lokasi penanaman yang sesuai kriteria semakin sulit di dapatkan	ROO.01.11.28	2	2	2	2	1	1,8
29	Pohon yang di tanam di daerah konservasi mati/kering	ROO.01.11.29	3	2	2	2	2	2,2
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota.	RSO. 01.11.06	3	2	2	1	2	2



2	Tidak maksimal nya PAD Kota Bogor dari Sektor Retribusi Persampahan	RSO. 01.11.07	3	2	2	1	2	2
3	Tidak terangkutnya sampah ke TPA Galuga	RSO. 01.11.08	2	2	3	1	2	2
4	Sistem Penutupan sampah dengan l lapisan tanah (control Landfill) tidak dapat dilaksanakan	RSO. 01.11.09	3	2	2	1	2	2
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>							
1	Belum tercukupinya pemeliharaan sarana dan prasarana di TPS 3R	ROO.01.11.30	1	2	2	1	2	1,6
2	Tidak dihasilkannya produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah di TPS 3R	ROO.01.11.31	1	3	3	2	2	2,2
3	Masih tercampurnya sampah organik dan non organik dari sumber	ROO.01.11.32	3	3	3	3	3	3
4	Kendaraan Pengangkut sampah Rusak	ROO.01.11.33	2	2	2	2	2	2
5	Tidak terangkutnya sampah	ROO.01.11.34	2	3	2	2	2	2,2
6	Petugas Kebersihan pengangkut sampah terkena penyakit	ROO.01.11.35	3	2	2	4	2	2,6
7	Terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS	ROO.01.11.36	3	2	4	2	2	2,6
8	Adanya gagal lelang pekerjaan konsultasi perencanaan	ROO.01.11.37	2	1	1	2	2	1,6
9	Adanya Keterlambatan dalam pengerjaan Controll Landfill	ROO.01.11.38	3	3	2	2	2	2,4
10	Titik lokasi pembangunan TPS belum jelas	ROO.01.11.39	1	2	2	1	2	1,6
11	Keterlambatan waktu pekerjaan pembangunan	ROO.01.11.40	3	3	2	2	2	2,4
12	Penumpukan Timbulan sampah di TPS	ROO.01.11.41	3	1	2	1	2	1,8
13	Rehabilitasi TPS belum bisa dilaksanakan	ROO.01.11.42	2	3	1	2	2	2
14	Keterbatasan SDM dalam pengerjaan rehabilitasi TPS	ROO.01.11.43	1	1	2	2	2	1,6
15	TPS tidak dapat digunakan untuk menampung sampah	ROO.01.11.44	2	1	2	1	2	1,6

16	Adanya alat berat yang tidak dapat diperbaiki	ROO.01.11.45	1	1	2	2	2	1,6
17	Pada saat pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba alat berat rusak	ROO.01.11.46	1	3	2	2	2	2
18	Pengelolaan sampah di TPA di Galuga tidak dapat dilaksanakan	ROO.01.11.47	3	3	2	2	2	2,4
19	Adanya gagal lelang pekerjaan penyediaan barang	ROO.01.11.48	2	1	2	2	2	1,8
20	Terjadinya Kecelakaan kerja pada saat petugas kebersihan menyapu jalan	ROO.01.11.49	3	2	2	2	2	2,2
21	Adanya keterlambatan proses pekerjaan	ROO.01.11.50	3	1	2	2	2	2
<b>B</b>	<b>Tujuan Strategis</b>							
	Tujuan Strategis : 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor							
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas	RSO. 01.11.10	2	2	1	2	2	1,8
2	Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang di laporkan oleh DLH tidak sesuai dengan format yang telah di tetapkan	RSO. 01.11.11	1	1	2	2	2	1,6
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>							
1	Kekurangan Tenaga ASN DLH	ROO.01.11.51	2	2	1	2	2	1,8
2	Tidak terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	ROO.01.11.52	1	3	2	2	1	1,8
3	Tidak memiliki data evaluasi kinerja	ROO.01.11.53	1	2	1	3	2	1,8
4	Analisis data capaian kinerja tidak tajam	ROO.01.11.54	2	2	3	1	3	2,2

5	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja	ROO.01.11.55	2	2	3	1	2	2
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dapat selesai tepat waktu	ROO.01.11.56	3	2	1	2	1	1,8
7	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.57	2	2	2	1	2	1,8
8	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.58	1	3	3	1	3	2,2
9	Tidak Tersedianya Peralatan rumah tangga	ROO.01.11.59	2	1	2	1	2	1,6
10	Adanya jumlah kenaikan kebutuhan operasional	ROO.01.11.60	2	3	2	3	1	2,2
11	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.61	1	1	2	1	2	1,4
12	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.62	2	2	1	2	2	1,8
13	Kesalahan dalam menentukan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	ROO.01.11.63	3	2	1	2	1	1,8
14	Barang discontinue (tidak tersedia)	ROO.01.11.64	2	1	2	1	2	1,6
15	Kurang tepatnya dalam penyusunan rincian anggaran perjalanan dinas	ROO.01.11.65	2	2	2	1	1	1,6
16	Perjalanan dinas tidak dapat dibiayai	ROO.01.11.66	1	2	2	2	2	1,8
17	Adanya jumlah kenaikan pemakaian listrik	ROO.01.11.67	3	2	2	2	3	2,4
18	Perekrutan pegawai Non PNS tidak sesuai kualifikasi	ROO.01.11.68	3	2	3	3	3	2,8
19	Kekurangan anggaran gaji non ASN	ROO.01.11.69	3	2	1	2	1	1,8
20	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan	ROO.01.11.70	3	2	1	2	1	1,8
21	Pengadministrasian tidak tepat waktu dan pemeliharaan tidak sesuai perencanaan	ROO.01.11.71	3	2	1	2	1	1,8
22	Bertambahnya bangunan gedung kantor yang harus diperbaiki karena terjadinya kerusakan di luar rencana yang sudah ditentukan	ROO.01.11.72	3	2	1	2	1	1,8

23	Adanya kerusakan gedung kantor dan bangunan di luar dari rencana pemeliharaan	ROO.01.11.73	3	2	1	2	1	1,8
24	Adanya kerusakan prasarana penunjang gedung kantor di luar rencana pemeliharaan	ROO.01.11.74	3	2	2	1	2	2
<b>C</b>	<b>Tujuan Strategis</b>							
	Tujuan Strategis : 3 Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH							
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Masyarakat tidak dapat mengetahui dan/atau mengakses informasi terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor	RSO. 01.11.12	1	2	2	2	2	1,8
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>							
1	Tidak tersusunnya Kerangka Acuan Kerja yang sesuai dengan pedoman	ROO.01.11.75	3	3	2	2	1	2,2
2	Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan upaya yang telah dilakukan Kota Bogor dalam pengelolaan lingkungannya	ROO.01.11.76	2	2	2	1	2	1,8
3	Muatan dalam Dokumen KLHS RPJMD tidak lengkap	ROO.01.11.77	1	2	2	1	1	1,4

Tabel III.6. Hasil Analisis Resiko Terhadap Kemungkinan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisa Risiko Terhadap Kemungkinan					Rata-rata skor Kemungkinan
			Skor ke.1 Kemungkinan	Skor ke.2 Kemungkinan	Skor ke.2 Kemungkinan	Skor ke.4 Kemungkinan	Skor ke.5 Kemungkinan	
1	2	3	4					5
A	<b>Tujuan Strategis</b>							
	Tujuan Strategis : 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup							
I	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Berkurangnya peran aktif dari masyarakat/Kelompok/Kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	RSO. 01.11.01	2	3	3	2	3	2,6
2	Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	RSO. 01.11.02	2	1	2	1	3	1,8
	Tujuan Strategis : 2 Terkendalinya Kualitas Air dan Udara							
II	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian dan	RSO. 01.11.01	3	2	3	1	2	2,2

	peternakan							
2	Menurunnya kualitas udara ambien;	RSO. 01.11.02	3	2	2	3	1	2,2
3	Meningkatnya emisi gas rumah kaca;	RSO. 01.11.03	2	2	1	2	1	1,6
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>							
1	Kurangnya jumlah sekolah yang diusulkan sebagai calon sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.01	1	2	1	2	2	1,6
2	Sekolah belum optimal menerapkan semua kriteria sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.02	1	2	2	1	2	1,6
3	Ketidaksiapan sekolah mengikuti Adiwiyata	ROO.01.11.03	2	1	1	1	1	1,2
4	Kurang sesuai materi dengan kondisi masyarakat	ROO.01.11.04	2	2	4	3	2	2,6
5	Kurangnya minat peserta	ROO.01.11.05	3	2	2	2	2	2,2
6	Kurangnya pemahaman terhadap materi	ROO.01.11.06	3	2	4	3	2	2,8
7	Adanya ketidakpahaman pelaku usaha untuk pengurusan dokumen lingkungan untuk penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha	ROO.01.11.07	3	2	4	3	3	3
8	Pelaku usaha/kegiatan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang disyaratkan di dokumen lingkungan	ROO.01.11.08	2	2	4	3	1	2,4

9	Ketidaksesuaian dokumen lingkungan yang harus disusun oleh pelaku usaha/kegiatan	ROO.01.11.09	2	1	2	1	2	1,6
10	Peringatan hari besar tidak dilaksanakan	ROO.01.11.10	2	1	3	2	1	1,8
11	Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti peringatan hari besar lingkungan hidup	ROO.01.11.11	3	2	2	1	2	2
12	Pelaksanaan hari besar lingkungan hidup tidak optimal	ROO.01.11.12	1	1	2	2	2	1,6
13	Tidak terlaksananya pengujian sesuai dengan musim	ROO.01.11.13	2	2	2	3	2	2,2
14	Lokasi Pengujian Sulit di capai	ROO.01.11.14	2	1	2	2	2	1,8
15	Hasil Pengujian kualitas air dibawah baku mutu	ROO.01.11.15	3	3	2	1	2	2,2
16	Kurang Akurat dan Terpercaya terkait hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca	ROO.01.11.16	2	1	2	2	2	1,8
17	Laporan hasil kajian Rehabilitasi lahan dan konservasi di DAS Cisadane kurang tajam	ROO.01.11.17	1	1	2	3	2	1,8
18	Tidak Teridentifikasi nya timbunan sampah spesifik rumah tangga di Kota Bogor	ROO.01.11.18	3	2	2	2	1	2
19	Lamanya waktu pengumpulan data timbunan sampah spesifik rumah tangga (Sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.19	2	2	2	3	2	2,2
20	Meningkatnya jumlah timbunan sampah spesifik rumah tangga (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.20	3	3	2	3	2	2,6
21	Banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki perizinan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.01.11.21	3	3	2	3	2	2,6

22	Adanya pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha	ROO.01.11.22	3	2	3	2	2	2,4
23	Pelaku usaha/kegiatan tidak memiliki dokumen lingkungan	ROO.01.11.23	3	2	2	1	2	2
24	Tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha/kegiatan dalam ketaatan perizinan lingkungan	ROO.01.11.24	4	3	2	3	3	3
25	Jumlah pengaduan masyarakat belum diketahui	ROO.01.11.25	1	1	2	2	2	1,6
26	Meningkatnya jumlah pengaduan lingkungan hidup	ROO.01.11.26	3	3	2	3	2	2,6
27	Tidak terkendalinya sumber Pencemar	ROO.01.11.27	3	2	2	2	2	2,2
28	Penentuan titik lokasi penanaman yang sesuai kriteria semakin sulit di dapatkan	ROO.01.11.28	3	2	2	1	2	2
29	Pohon yang di tanam di daerah konservasi mati/kering	ROO.01.11.29	3	3	2	3	2	2,6
I	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota.	RSO. 01.11.06	3	2	2	1	1	1,8
2	Tidak maksimal nya PAD Kota Bogor dari Sektor Retribusi Persampahan	RSO. 01.11.07	3	2	4	2	2	2,6
3	Tidak terangkutnya sampah ke TPA Galuga	RSO. 01.11.08	2	1	2	2	2	1,8
4	Sistem Penutupan sampah dengan lapisan tanah (control Landfill) tidak dapat dilaksanakan	RSO. 01.11.09	3	2	2	1	1	1,8
II	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>							



1	Belum tercukupinya pemeliharaan sarana dan prasarana di TPS 3R	ROO.01.11.30	3	2	2	1	2	2
2	Tidak dihasilkannya produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah di TPS 3R	ROO.01.11.31	2	1	2	1	3	1,8
3	Masih tercampurnya sampah organik dan non organik dari sumber	ROO.01.11.32	2	3	1	2	3	2,2
4	Kendaraan Pengangkut sampah Rusak	ROO.01.11.33	2	3	4	3	3	3
5	Tidak terangkutnya sampah	ROO.01.11.34	3	1	2	2	1	1,8
6	Petugas Kebersihan pengangkut sampah terkena penyakit	ROO.01.11.35	2	2	4	3	2	2,6
7	Terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS	ROO.01.11.36	2	2	4	2	2	2,4
8	Adanya gagal lelang pekerjaan konsultansi perencanaan	ROO.01.11.37	1	1	2	2	2	1,6
9	Adanya Keterlambatan dalam pengerjaan Controll Landfill	ROO.01.11.38	3	3	4	3	3	3,2
10	Titik lokasi pembangunan TPS belum jelas	ROO.01.11.39	3	1	2	1	2	1,8
11	Keterlambatan waktu pekerjaan pembangunan	ROO.01.11.40	1	1	1	2	2	1,4
12	Penumpukan Timbulan sampah di TPS	ROO.01.11.41	1	1	2	3	3	2
13	Rehabilitasi TPS belum bisa dilaksanakan	ROO.01.11.42	1	1	2	2	2	1,6
14	Keterbatasan SDM dalam pengerjaan rehabilitasi TPS	ROO.01.11.43	1	1	2	3	3	2
15	TPS tidak dapat digunakan untuk menampung sampah	ROO.01.11.44	3	2	3	1	2	2,2
16	Adanya alat berat yang tidak dapat diperbaiki	ROO.01.11.45	2	2	2	2	2	2
17	Pada saat pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba alat berat rusak	ROO.01.11.46	3	2	4	2	2	2,6

18	Pengelolaan sampah di TPA di Galuga tidak dapat dilaksanakan	ROO.01.11.47	1	1	2	2	2	1,6
19	Adanya gagal lelang pekerjaan penyediaan barang	ROO.01.11.48	1	2	1	2	2	1,6
20	Terjadinya Kecelakaan kerja pada saat petugas kebersihan menyapu jalan	ROO.01.11.49	3	2	4	2	2	2,6
21	Adanya keterlambatan proses pekerjaan	ROO.01.11.50	2	2	2	2	1	1,8
<b>B</b>	<b>Tujuan Strategis</b>							
	Tujuan Strategis : 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor							
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas	RSO. 01.11.10	3	2	2	2	2	2,2
2	Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang di laporkan oleh DLH tidak sesuai dengan format yang telah di tetapkan	RSO. 01.11.11	3	2	2	3	2	2,4
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>							
1	Kekurangan Tenaga ASN DLH	ROO.01.11.13	2	2	2	2	2	2
2	Tidak terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	ROO.01.11.14	1	3	2	2	1	1,8
3	Tidak memiliki data evaluasi kinerja	ROO.01.11.15	3	2	1	1	2	1,8
4	Analisis data capaian kinerja tidak tajam	ROO.01.11.16	1	2	2	1	2	1,6

5	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja	ROO.01.11.17	1	1	2	3	2	1,8
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dapat selesai tepat waktu	ROO.01.11.18	1	2	2	1	2	1,6
7	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.19	3	2	2	2	2	2,2
8	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.20	1	2	2	1	2	1,6
9	Tidak Tersedianya Peralatan rumah tangga	ROO.01.11.21	1	2	2	1	2	1,6
10	Adanya jumlah kenaikan kebutuhan operasional	ROO.01.11.22	1	2	2	1	2	1,6
11	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.23	3	2	2	2	2	2,2
12	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.24	2	2	2	3	2	2,2
13	Kesalahan dalam menentukan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	ROO.01.11.16	1	2	2	2	2	1,8
14	Barang discontinue (tidak tersedia)	ROO.01.11.17	2	2	2	2	1	1,8
15	Kurang tepatnya dalam penyusunan rincian anggaran perjalanan dinas	ROO.01.11.18	3	2	2	2	1	2
16	Perjalanan dinas tidak dapat dibiayai	ROO.01.11.19	1	1	2	2	1	1,4
17	Adanya jumlah kenaikan pemakaian listrik	ROO.01.11.20	1	1	1	1	1	1
18	Perekrutan pegawai Non PNS tidak sesuai kualifikasi	ROO.01.11.21	2	1	2	1	1	1,4
19	Kekurangan anggaran gaji non ASN	ROO.01.11.22	2	3	2	2	1	2
20	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan	ROO.01.11.23	1	1	2	1	2	1,4

21	Pengadministrasian tidak tepat waktu dan pemeliharaan tidak sesuai perencanaan	ROO.01.11.24	2	2	1	2	2	1,8
22	Bertambahnya bangunan gedung kantor yang harus diperbaiki karena terjadinya kerusakan di luar rencana yang sudah ditentukan	ROO.01.11.25	3	2	1	2	2	2
23	Adanya kerusakan gedung kantor dan bangunan di luar dari rencana pemeliharaan	ROO.01.11.26	2	1	2	1	2	1,6
24	Adanya kerusakan prasarana penunjang gedung kantor di luar rencana pemeliharaan	ROO.01.11.27	2	1	2	1	2	1,6
<b>C</b>	<b>Tujuan Strategis</b>							
	Tujuan Strategis : 3 Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH							
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Masyarakat tidak dapat mengetahui dan/atau mengakses informasi terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor	RSO. 01.11.12	1	2	1	2	3	1,8
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>							
1	Tidak tersusunnya Kerangka Acuan Kerja yang sesuai dengan pedoman	ROO.01.11.31	3	1	2	2	1	1,8

2	Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan upaya yang telah dilakukan Kota Bogor dalam pengelolaan lingkungannya	ROO.01.11.32	2	2	2	1	2	1,8
3	Muatan dalam Dokumen KLHS RPJMD tidak lengkap	ROO.01.11.33	3	3	2	3	2	2,6

Analisa terhadap resiko-resiko dilakukan dengan penyebaran angket/kuisisioner kepada pegawai serta dilakukan Forum Grup Discussion (FGD) pada setiap bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta Hasil Analisis risiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagaimana table III.7 dibawah ini.

Analisis terhadap resiko-resiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel III.7 Hasil Analisis Resiko**

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5
<b>A</b>	<b>Tujuan Strategis</b>				
	Tujuan Strategis : 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>				
1	Berkurangnya peran aktif dari masyarakat/Kelompok/Kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	RSO. 01.11.01	2,2	2,6	5,72
2	Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	RSO. 01.11.02	2	1,8	3,6
	Tujuan Strategis : 2 Terkendalinya Kualitas Air dan Udara				
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>				
1	Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian dan peternakan	RSO. 01.11.01	2	2,2	4,4
2	Menurunnya kualitas udara ambien;	RSO. 01.11.02	2	2,2	4,4
3	Meningkatnya emisi gas rumah kaca;	RSO. 01.11.03	2,2	1,6	3,52
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>				

1	Kurangnya jumlah sekolah yang diusulkan sebagai calon sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.01	2,2	1,6	3,52
2	Sekolah belum optimal menerapkan semua kriteria sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.02	2,4	1,6	3,84
3	Ketidaksiapan sekolah mengikuti Adiwiyata	ROO.01.11.03	3	1,2	3,6
4	Kurang sesuai materi dengan kondisi masyarakat	ROO.01.11.04	1,2	2,6	3,12
5	Kurangnya minat peserta	ROO.01.11.05	1,6	2,2	3,52
6	Kurangnya pemahaman terhadap materi	ROO.01.11.06	1	2,8	2,8
7	Adanya ketidakpahaman pelaku usaha untuk pengurusan dokumen lingkungan untuk penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha	ROO.01.11.07	3,2	3	9,6
8	Pelaku usaha/kegiatan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang disyaratkan di dokumen lingkungan	ROO.01.11.08	3,4	2,4	8,16
9	Ketidaksesuaian dokumen lingkungan yang harus disusun oleh pelaku usaha/kegiatan	ROO.01.11.09	2,2	1,6	3,52
10	Peringatan hari besar tidak dilaksanakan	ROO.01.11.10	1,8	1,8	3,24
11	Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti peringatan hari besar lingkungan hidup	ROO.01.11.11	1,8	2	3,6
12	Pelaksanaan hari besar lingkungan hidup tidak optimal	ROO.01.11.12	2,2	1,6	3,52
13	Tidak terlaksananya pengujian sesuai dengan musim	ROO.01.11.13	2,8	2,2	6,16
14	Lokasi Pengujian Sulit di capai	ROO.01.11.14	1,8	1,8	3,24
15	Hasil Pengujian kualitas air dibawah baku mutu	ROO.01.11.15	2,4	2,2	5,28
16	Kurang Akurat dan Terpercaya terkait hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca	ROO.01.11.16	2	1,8	3,6



17	Laporan hasil kajian Rehabilitasi lahan dan konservasi di DAS Cisadane kurang tajam	ROO.01.11.17	2,2	1,8	3,96
18	Tidak Teridentifikasi nya timbunan sampah spesifik rumah tangga di Kota Bogor	ROO.01.11.18	1,8	2	3,6
19	Lamanya waktu pengumpulan data timbunan sampah spesifik rumah tangga (Sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.19	1,6	2,2	3,52
20	Meningkatnya jumlah timbunan sampah spesifik rumah tangga (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.20	2,2	2,6	5,72
21	Banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki perizinan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.01.11.21	2,2	2,6	5,72
22	Adanya pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha	ROO.01.11.22	3	2,4	7,2
23	Pelaku usaha/kegiatan tidak memiliki dokumen lingkungan	ROO.01.11.23	1,6	2	3,2
24	Tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha/kegiatan dalam ketaatan perizinan lingkungan	ROO.01.11.24	2,2	3	6,6
25	Jumlah pengaduan masyarakat belum diketahui	ROO.01.11.25	2,2	1,6	3,52
26	Meningkatnya jumlah pengaduan lingkungan hidup	ROO.01.11.26	2,2	2,6	5,72
27	Tidak terkendalinya sumber Pencemar	ROO.01.11.27	1,8	2,2	3,96
28	Penentuan titik lokasi penanaman yang sesuai kriteria semakin sulit di dapatkan	ROO.01.11.28	1,8	2	3,6
29	Pohon yang di tanam di daerah konservasi mati/kering	ROO.01.11.29	2,2	2,6	5,72
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>				

1	Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota.	RSO. 01.11.06	2	1,8	3,6
2	Tidak maksimal nya PAD Kota Bogor dari Sektor Retribusi Persampahan	RSO. 01.11.07	2	2,6	5,2
3	Tidak terangkutnya sampah ke TPA Galuga	RSO. 01.11.08	2	1,8	3,6
4	Sistem Penutupan sampah dengan lapisan tanah (control Landfill) tidak dapat dilaksanakan	RSO. 01.11.09	2	1,8	3,6
II	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>				
1	Belum tercukupinya pemeliharaan sarana dan prasarana di TPS 3R	ROO.01.11.30	1,6	2	3,2
2	Tidak dihasilkannya produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah di TPS 3R	ROO.01.11.31	2,2	1,8	3,96
3	Masih tercampurnya sampah organik dan non organik dari sumber	ROO.01.11.32	3	2,2	6,6
4	Kendaraan Pengangkut sampah Rusak	ROO.01.11.33	2	3	6
5	Tidak terangkutnya sampah	ROO.01.11.34	2,2	1,8	3,96
6	Petugas Kebersihan pengangkut sampah terkena penyakit	ROO.01.11.35	2,6	2,6	6,76
7	Terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS	ROO.01.11.36	2,6	2,4	6,24
8	Adanya gagal lelang pekerjaan konsultasi perencanaan	ROO.01.11.37	1,6	1,6	2,56
9	Adanya Keterlambatan dalam pengerjaan Controll Landfill	ROO.01.11.38	2,4	3,2	7,68
10	Titik lokasi pembangunan TPS belum jelas	ROO.01.11.39	1,6	1,8	2,88
11	Keterlambatan waktu pekerjaan pembangunan	ROO.01.11.40	2,4	1,4	3,36
12	Penumpukan Timbulan sampah di TPS	ROO.01.11.41	1,8	2	3,6
13	Rehabilitasi TPS belum bisa dilaksanakan	ROO.01.11.42	2	1,6	3,2

14	Keterbatasan SDM dalam pengerjaan rehabilitasi TPS	ROO.01.11.43	1,6	2	3,2
15	TPS tidak dapat digunakan untuk menampung sampah	ROO.01.11.44	1,6	2,2	3,52
16	Adanya alat berat yang tidak dapat diperbaiki	ROO.01.11.45	1,6	2	3,2
17	Pada saat pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba alat berat rusak	ROO.01.11.46	2	2,6	5,2
18	Pengelolaan sampah di TPA di Galuga tidak dapat dilaksanakan	ROO.01.11.47	2,4	1,6	3,84
19	Adanya gagal lelang pekerjaan penyediaan barang	ROO.01.11.48	1,8	1,6	2,88
20	Terjadinya Kecelakaan kerja pada saat petugas kebersihan menyapu jalan	ROO.01.11.49	2,2	2,6	5,72
21	Adanya keterlambatan proses pekerjaan	ROO.01.11.50	2	1,8	3,6
<b>B</b>	<b>Tujuan Strategis</b>				
	Tujuan Strategis : 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor				
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>				
1	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas	RSO. 01.11.10	1,8	2,2	3,96
2	Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang di laporkan oleh DLH tidak sesuai dengan format yang telah di tetapkan	RSO. 01.11.11	1,6	2,4	3,84
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>				
1	Kekurangan Tenaga ASN DLH	ROO.01.11.13	1,8	2	3,6

2	Tidak terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	ROO.01.11.14	1,8	1,8	3,24
3	Tidak memiliki data evaluasi kinerja	ROO.01.11.15	1,8	1,8	3,24
4	Analisis data capaian kinerja tidak tajam	ROO.01.11.16	2,2	1,6	3,52
5	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja	ROO.01.11.17	2	1,8	3,6
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dapat selesai tepat waktu	ROO.01.11.18	1,8	1,6	2,88
7	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.19	1,8	2,2	3,96
8	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.20	2,2	1,6	3,52
9	Tidak Tersedianya Peralatan rumah tangga	ROO.01.11.21	1,6	1,6	2,56
10	Adanya jumlah kenaikan kebutuhan operasional	ROO.01.11.22	2,2	1,6	3,52
11	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.23	1,4	2,2	3,08
12	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.24	1,8	2,2	3,96
13	Kesalahan dalam menentukan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	ROO.01.11.16	1,8	1,8	3,24
14	Barang discontinue (tidak tersedia)	ROO.01.11.17	1,6	1,8	2,88
15	Kurang tepatnya dalam penyusunan rincian anggaran perjalanan dinas	ROO.01.11.18	1,6	2	3,2
16	Perjalanan dinas tidak dapat dibiayai	ROO.01.11.19	1,8	1,4	2,52
17	Adanya jumlah kenaikan pemakaian listrik	ROO.01.11.20	2,4	1	2,4
18	Perekrutan pegawai Non PNS tidak sesuai kualifikasi	ROO.01.11.21	2,8	1,4	3,92
19	Kekurangan anggaran gaji non ASN	ROO.01.11.22	1,8	2	3,6
20	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan	ROO.01.11.23	1,8	1,4	2,52

21	Pengadministrasian tidak tepat waktu dan pemeliharaan tidak sesuai perencanaan	ROO.01.11.24	1,8	1,8	3,24
22	Bertambahnya bangunan gedung kantor yang harus diperbaiki karena terjadinya kerusakan di luar rencana yang sudah ditentukan	ROO.01.11.25	1,8	2	3,6
23	Adanya kerusakan gedung kantor dan bangunan di luar dari rencana pemeliharaan	ROO.01.11.26	1,8	1,6	2,88
24	Adanya kerusakan prasarana penunjang gedung kantor di luar rencana pemeliharaan	ROO.01.11.27	2	1,6	3,2
<b>C</b>	<b>Tujuan Strategis</b>				
	Tujuan Strategis : 3 Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH				
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>				
1	Masyarakat tidak dapat mengetahui dan/atau mengakses informasi terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor	RSO. 01.11.12	1,8	1,8	3,24
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>				
1	Tidak tersusunnya Kerangka Acuan Kerja yang sesuai dengan pedoman	ROO.01.11.31	2,2	1,8	3,96
2	Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan upaya yang telah dilakukan Kota Bogor dalam pengelolaan lingkungannya	ROO.01.11.32	1,8	1,8	3,24
3	Muatan dalam Dokumen KLHS RPJMD tidak lengkap	ROO.01.11.33	1,4	2,6	3,64

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian dampak resiko bahwa dampak resiko itu tingkatannya mulai dari rendah sekali, rendah, tinggi dan tinggi sekali dampak terjadinya resiko terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

Dari hasil analisis dampak resiko pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terlihat bahwa Skala hasil analisis resiko tertinggi adalah 10,88.

**Tabel III. 8 Daftar Risiko Prioritas**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
A	<b>Tujuan Strategis</b>					
	Tujuan Strategis : 1 Terwujudnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup					
I	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>					
1	Berkurangnya peran aktif dari masyarakat/Kelompok/Kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	RSO. 01.11.01	5,72	Kabid Tata Lingkungan	Menurunnya kepedulian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Lingkungan menjadi kotor dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit
II	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>					
1	Adanya ketidakpahaman pelaku usaha untuk pengurusan dokumen lingkungan untuk penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha	ROO.01.11.07	9,6	Kabid Tata Lingkungan	Masih belum Sinkronnya peraturan terkait lingkungan hidup dan perizinan berusaha	Pelaku usaha/Kegiatan tidak menyusun Dokumen Lingkungan saat mengajukan persyaratan perizinan berusaha
2	Pelaku usaha/kegiatan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang disyaratkan di dokumen lingkungan	ROO.01.11.08	8,16	Kabid Tata Lingkungan	Pelaku usaha/kegiatan belum memahami isi dokumen lingkungan	Terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
3	Tidak terlaksananya pengujian sesuai dengan musim	ROO.01.11.13	6,16	Kabid PPLKPI	Cuaca yang tidak menentu kada	Pelaksanaan pekerjaan terhambat

4	Hasil Pengujian kualitas air dibawah baku mutu	ROO.01.11.15	5,28	Kabid PPLPI	Kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah yang dibuang ke sungai meningkat serta buangan dari rumah tangga yang masuk ke sungai	Kondisi air sungai menjadi tercemar
5	Meningkatnya jumlah timbunan sampah spesifik rumah tangga (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.20	5,72	Kabid PPLKPI	Keterbatasan anggaran yang disediakan untuk pengelolaan sampah spesifik rumah tangga	Terjadinya penumpukan sampah spesifik rumah tangga yang belum dipilah
6	Banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki perizinan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.01.11.21	5,72	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Adanya temuan ketidakpatuhan pelaku usaha/kegiatan terhadap kewajiban yang ada di pearturan perundangan lingkungan	Pelaku usaha/Kegiatan tidak memiliki dokumen lingkungan
7	Adanya pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha	ROO.01.11.22	7,2	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Pelaku usaha/Kegiatan kurang mendapat informasi terkait peraturan tata cara pengelolaan izin lingkungan	Kegiatan/usaha tidak memiliki perizinin lingkungan
8	Tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha/kegiatan dalam ketaatan perizinan lingkungan	ROO.01.11.24	6,6	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Dokumen perizinan lingkungan disamakan dengan perizinan yang lainnya	Meningkatnya pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan/usaha
9	Meningkatnya jumlah pengaduan lingkungan hidup	ROO.01.11.26	5,72	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Semakin banyaknya pengaduan lingkungan hidup yang masuk dan mengakibatkan tidak terselesaikannya pengaduan lingkungan hidup



10	Pohon yang di tanam di daerah konservasi mati/kering	ROO.01.11.29	5,72	Kabid PPLKPI	- kurangnya perhatian dari petugas pemelihara pohon - Anggaran dan SDM untuk O dan P terbatas	Pemeliharaan pohon tidak berjalan dengan baik
<b>I Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>						
1	Tidak maksimal nya PAD Kota Bogor dari Sektor Retribusi Persampahan	RSO. 01.11.07	5,2	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam pembayaran retribusi sampah	Berkurangnya retribusi sampah yang masuk ke kas negara
<b>II Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>						
1	Masih tercampurnya sampah organik dan non organik dari sumber	ROO.01.11.32	6,6	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Kurangnya edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah dari rumah	Sampah masih belum terpilah
2	Kendaraan Pengangkut sampah Rusak	ROO.01.11.33	6	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Tidak terpeliharanya kendaraan kendaraan operasional pengangkut sampah dan umur kendaraan pengangkut sampah yang sudah tua	Kendaraan tidak bisa dipakai untuk mengangkut sampah
3	Petugas Kebersihan pengangkut sampah terkena penyakit	ROO.01.11.35	6,76	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Sampah yang menumpuk di Truk dan asap kendaraan bermotor di jalanan	Terhambatnya pelaksanaan pengangkutasn sampah
4	Terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS	ROO.01.11.36	6,24	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Kendaraan pengangkut sampah yang rusak (mogok)	Terhambatnya pelaksanaan pengangkutasn sampah
5	Adanya Keterlambatan dalam pengerjaan Controll Landfill	ROO.01.11.38	7,68	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Curah hujan tinggi dan terkendala kurangnya alat berat	Pekerjaan akan menjadi bertambah lama tidak sesuai target yang telah ditetapkan serta dapat mengganggu lingkungan.

6	Pada saat pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba alat berat rusak	ROO.01.11.46	5,2	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Umur Alat Berat di TPA Galuga sudah tua	Terhambatnya pengelolaan sampah di TPA di Galuga
7	Terjadinya Kecelakaan kerja pada saat petugas kebersihan menyapu jalan	ROO.01.11.49	5,72	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Kendaraan yang melintas tidak berhati hati dan petugas penyapu tidak memperhatikan SOP penyapuan jalan	Pelaksanaan penyapuan menjadi terhambat

Tabel III.9 Penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<b>Tujuan Strategis</b>						
	Tujuan Strategis : 1 Terwujudnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup						
I	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>						
1	Berkurangnya peran aktif dari masyarakat/Kelompok/Kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	RSO. 01.11.01	Peningkatan pengembangan kapasitas kelembagaan dengan target meningkatkan jumlah kelompok-kelompok peduli lingkungan, dan jumlah masyarakat yang melakukan inisiatif di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup	Melakukan pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan hidup kepada masyarakat/kelompok / kegiatan usaha	Kabid Tata Lingkungan	Februari- November 2023
II	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>						

1	Adanya ketidakpahaman pelaku usaha untuk pengurusan dokumen lingkungan untuk penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha	ROO.01.11.07	Koordinasi dengan Kegiatan atau usaha terkait pengurusan dokumen lingkungan	Ketidak pahaman pelaku usaha atau kegiatan terkait perizinan lingkungan	Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan terhadap kegiatan atau usaha	Kabid Tata Lingkungan	Februari- November 2023
2	Pelaku usaha/kegiatan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang disyaratkan di dokumen lingkungan	ROO.01.11.08	Koordinasi dengan Kegiatan atau usaha terkait pemahaman isi dokumen lingkungan	Ketidak pahaman pelaku usaha atau kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup	Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009	Kabid Tata Lingkungan	Januari - Desember 2023
3	Tidak terlaksananya pengujian sesuai dengan musim	ROO.01.11.13	Jadwal Pengujian yang sudah dibuat	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	Melaksanakan pengujian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Kabid PPLKPI	Januari - Desember 2023

4	Hasil Pengujian kualitas air dibawah baku mutu	ROO.01.11.15	Sudah dilaksanakan Pengujian Kualitas air setiap musim hujan dan kemarau	Menerapkan Per Men LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang memiliki izin lingkungan AMDAL dan UKL/UPL wajib memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah	Melaksanakan pembinaan terhadap Kegiatan/usaha untuk melaksanakan pengelolaan kualitas limbah	Kabid PPLKPI	Januari - Desember 2023
5	Meningkatnya jumlah timbunan sampah spesifik rumah tangga (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.20	Sudah memiliki PP no 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan sampah spesifik dan UU no 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Melaksanakan Sosialisasi terkait sampah spesifik rumah tangga	Kabid PPLKPI	Januari - Desember 2023
6	Banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki perizinan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.01.11.21	Melaksanakan pengawasan kepada kegiatan atau usaha yang belum memiliki perizinan	Masih kurangnya SDM di bidang pengawasan yang berkompeten	menyurati pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan atau usaha untuk menyusun dokumen DELH atau DPLH (bagi kegiatan pemerintah) dan memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menyusun DELH atau	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Januari - Desember 2023

					DELH (bagi kegiatan swasta)		
7	Adanya pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha	ROO.01.11.22	Melaksanakan pengawasan kepada kegiatan atau usaha	Ketidak pahaman pelaku usaha atau kegiatan terkait perizinan lingkungan	Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang melanggar perizinan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2021	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Januari - Desember 2023
8	Tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha/kegiatan dalam ketaatan perizinan lingkungan	ROO.01.11.24	Koordinasi dengan pelaku kegiatan atau usaha	Masih rendahnya pengetahuan para pelaku kegiatan atau usaha terkait lingkungan	Melaksanakan Sosialisasi untuk memberikan informasi dan desiminasi peraturan perundangan terbaru kepada pelaku usaha / kegiatan, terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan serta sanksi yang di dapat bila terjadi pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus mencari jalan keluar bila terjadi kendala dan hambatan.	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Januari - Desember 2023

9	Meningkatnya jumlah pengaduan lingkungan hidup	ROO.01.11.26	Prosedur penanganan pengaduan juga dilaksanakan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	SDM terkait pengaduan tidak ada	Memfasilitasi media Pengaduan yaitu melalui media pengaduan berupa telepon, surat, surat elektronik, faksimile, pesan singkat, website, media sosial, aplikasi pengaduan dan media lain sesuai dengan perkembangan teknologi.	Kabid PPLKPI	Januari - Desember 2023
10	Pohon yang di tanam di daerah konservasi mati/kering	ROO.01.11.29	Penanaman pohon sudah sesuai dengan SOP penanaman pohon	Koordinasi dengan wilayah lokasi penanaman	Monitoring dan Evaluasi ke lokasi penanaman pohon	Kabid PPLKPI	Maret - November 2023
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>						
1	Tidak maksimal nya PAD Kota Bogor dari Sektor Retribusi Persampahan	RSO. 01.11.07	Sudah ada Perda No 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	Kurangnya kesadaran masyarakat/kegiatan atau usaha dalam membayar Retribusi sampah	Sosialisasi kepada masyarakat terkait retribusi sampah serta peningkatan sumber daya manusia di bidang persampahan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>						

1	Masih tercampurnya sampah organik dan non organik dari sumber	ROO.01.11.32	Sudah ada Perda No 9 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah	Kurangnya Sarana dan Prasarana di TPS 3R atau Bank Sampah untuk pengelolaan sampah organik dan non organik	Masyarakat menyiapkan satu wadah khusus untuk membuang sampah kemasan atau non organik agar tidak tercampur dengan sampah organik dan bisa dibawa ke Bank Sampah atau TPS 3R	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023
2	Kendaraan Pengangkut sampah Rusak	ROO.01.11.33	Kurangnya armada pengangkutan sampah yang dimiliki DLH	Kondisi kendaraan pengangkut sampah yang sudah rusak dan umur kendaraan yang sudah tua	Melaksanakan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkut sampah secara berkala serta Pengadaan Armada Pengangkut Sampah yang baru	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023
3	Petugas Kebersihan pengangkut sampah terkena penyakit	ROO.01.11.35	Sudah diberikannya masker dan sarung tangan untuk Petugas Kebersihan pengangkut sampah	Masih banyak petugas pengangkut sampah yang belum mengetahui tentang kesehatan	Dilaksanakannya sosialisasi/ penyuluhan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja baik dari segi jenis, fungsi dan manfaat. Sehingga petugas kebersihan pengangkut sampah belum memahami pengetahuan kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023



4	Terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS	ROO.01.11.36	Sudah ada Jadwal Pengangkutan sampah di setiap TPS	pengangkutan sampah di TPS kurang optimal	Melaksanakan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkut sampah secara berkala serta Pengadaan Armada Pengangkut Sampah yang baru	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023
5	Adanya Keterlambatan dalam pengerjaan Controll Landfill	ROO.01.11.38	Telah dilaksanakan pekerjaan controll landfill	Anggaran untuk pekerjaan controll landfill terbatas	Adanya pemeliharaan Alat berat secara rutin	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023
6	Pada saat pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba alat berat rusak	ROO.01.11.46	Alat berat ekskavator yang biasa digunakan untuk menampung dan mengolah sampah yang diturunkan dari truk sampah mengalami kerusakan	Alat berat kurang mendapat perawatan yang optimal	Adanya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk controll landfill	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023
7	Terjadinya Kecelakaan kerja pada saat petugas kebersihan menyapu jalan	ROO.01.11.49	Petugas kebersihan Sudah dibekali atribut berupa rompi safety scotlight saat menjalankan tugasnya	Ketidak hati-hatian petugas kebersihan pada saat menyapu jalan	Dalam menjalankan tugasnya petugas kebersihan harus menerapkan SOP Penyapu jalan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023

Berdasarkan hasil identifikasi pengendalian di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor melakukan beberapa upaya tindak pengendalian yang dibutuhkan, antara lain melalui :

1. Penambahan Jumlah Anggaran dalam penyusunan Kajian, perencanaan dan pelaporan ;
2. Merencanakan penambahan dan peremajaan armada pengangkut sampah secara bertahap sesuai dengan kemampuan penganggaran;
3. Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan armada pengangkut sampah secara berkala;
4. Melaksanakan Perbaikan dan pemeliharaan alat berat yang ada di TPA secara berkala;
5. Meningkatkan kegiatan penyadaran masyarakat melalui sosialisasi pengelolaan sampah;
6. Melaksanakan pembinaan kepada sekolah –sekolah yang diusulkan sebagai sekolah Adiwiyata
7. Kejelasan Lokasi untuk Pembangunan Pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan landasan container dan TPS
8. Melaksanakan koordinasi, komunikasi dan pembinaan rutin kepada para pegawai pns dan non pns petugas kebersihan;
9. Membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar TPA;

## **BAB IV**

### **RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Untuk menurunkan terjadinya resiko dalam pelaksanaan sub Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pencapaian strategis perangkat daerah maka dilakukan beberapa media informasi dan komunikasi yaitu melalui briefing staf atau evaluasi berkala selain itu dilaksanakannya Sosialisasi, pelatihan Rapat, Surat Telephone, Faximili, Surat, Surat Elektronik, Website, Medsos, Pesan Singkat dapat kita lihat pada tabel IV. 1 dibawah ini. .

**Tabel IV. 1 Rencana Dan Realisasi Atas Pengkomunikasian Dan Realisasi Atas Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Dibangun**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan hidup kepada masyarakat/kelompok/kegiatan usaha	Sosialisasi dan Pelatihan	DLH dan Komunitas Peduli Lingkungan	Masyarakat, Pelaku Kegiatan/Usaha	Februari-November 2023		
2	Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan terhadap kegiatan atau usaha	Sosialisasi dan Pelatihan	DLH dan Komunitas Peduli Lingkungan	Pelaku Kegiatan/usaha	Februari-November 2023		
3	Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009	Surat Teguran dan Berita Acara	DLH	Pelaku Kegiatan/usaha	Januari - Desember 2023		
4	Melaksanakan pengujian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,	Pelatihan	DLH	DLH, Laboratorium	Januari - Desember 2023		
5	Melaksanakan pembinaan terhadap Kegiatan/usaha untuk melaksanakan pengelolaan kualitas limbah	Pembinaan atau pelatihan	DLH	Pelaku Kegiatan/usaha	Januari - Desember 2023		
6	Melaksanakan Sosialisasi terkait sampah spesifik rumah tangga	Sosialisasi	DLH	Masyarakat	Januari - Desember 2023		

7	Menyurati pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan atau usaha untuk menyusun dokumen DELH atau DPLH (bagi kegiatan pemerintah) dan memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menyusun DELH atau DELH (bagi kegiatan swasta)	Surat	DLH	Pelaku Kegiatan/usaha	Januari - Desember 2023		
8	Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang melanggar perizinan lingkungan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2021	Surat, Sosialisasi, Rapat	DLH, Kementrian Lingk Hidup	Pelaku Kegiatan/usaha	Januari - Desember 2023		
9	Melaksanakan Sosialisasi untuk memberikan informasi dan desiminasi peraturan perundangan terbaru kepada pelaku usaha / kegiatan, terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan serta sanksi yang di dapat bila terjadi pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus mencari jalan keluar bila terjadi kendala dan hambatan.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi	DLH	Pelaku Kegiatan/usaha	Januari - Desember 2023		
10	Memfasilitasi media Pengaduan yaitu melalui media pengaduan berupa telepon, surat, surat elektronik, faksimile, pesan singkat, website, media sosial, aplikasi pengaduan dan media lain sesuai dengan perkembangan teknologi	Surat Teguran dan Berita Acara	DLH	Wilayah (Kecamatan dan Kelurahan) dan Pelaku/Usaha	Januari - Desember 2023		

11	Monitoring dan Evaluasi ke lokasi penanaman pohon	Rapat Koordinasi	DLH	Wilayah (Kecamatan dan Kelurahan)	Januari - Desember 2023		
12	Sosialisasi kepada masyarakat terkait retribusi sampah serta peningkatan sumber daya manusia di bidang persampahan	Sosialisasi	DLH	Masyarakat, Pelaku Kegiatan/Usaha	Januari - Desember 2023		
13	Masyarakat menyiapkan satu wadah khusus untuk membuang sampah kemasan atau non organik agar tidak tercampur dengan sampah organik dan bisa dibawa ke Bank Sampah atau TPS 3R	Sosialisasi, Surat Edaran	DLH	Masyarakat	Januari - Desember 2023		
14	Melaksanakan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkut sampah secara berkala serta Pengadaan Armada Pengangkut Sampah yang baru	Surat, Rapat	DLH	DLH	Januari - Desember 2023		
15	Dilaksanakannya sosialisasi/penyuluhan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja baik dari segi jenis, fungsi dan manfaat. Sehingga petugas kebersihan pengangkut sampah belum memahami pengetahuan kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik.	Sosialisasi, Rapat, Pelatihan	DLH	DLH	Januari - Desember 2023		
16	Melaksanakan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkut sampah secara berkala serta Pengadaan Armada Pengangkut Sampah yang baru	Surat usulan, Rapat	DLH	DLH dan Penyedia	Januari - Desember 2023		

17	Adanya pemeliharaan Alat berat secara rutin	Rapat Koordinasi	DLH	DLH dan Penyedia	Januari - Desember 2023		
18	Adanya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk control landfill	Rapat Koordinasi	DLH	DLH	Januari - Desember 2023		
19	Dalam menjalankan tugasnya petugas kebersihan harus menerapkan SOP Penyapu jalan	Surat, SOP	DLH	DLH	Januari - Desember 2023		

## **BAB V**

### **RANCANGAN PEMANTAUAN**

Untuk memastikan bahwa rancangan pengendalian resiko yang telah disusun telah dilaksanakan dan berjalan dengan efektif, maka diperlukan rancangan pemantauan pengendalian resiko. Pemantauan dilakukan untuk meminimalisir risiko atau semakin menambah terjadi resiko terhadap upaya pencapaian sasaran baik strategis maupun operasional. Secara umum pemantauan ada tiga jenis yaitu pemantauan atas implementasi pengendalian, pemantauan kejadian resiko dan pemantauan pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan Resiko

Mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa resiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif berdasarkan tabel V.1 dibawah ini adalah monitoring langsung, pemantauan berkelanjutan, koordinasi dengan instansi lain, pembinaan terhadap pelaku/kegiatan usaha, Dokumen, survey serta melaksanakan identifikasi.



**TABEL V.1 RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Melakukan pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan hidup kepada masyarakat/kelompok/kegiatan usaha	Monitoring langsung	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Februari-November 2023		
2	Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan terhadap kegiatan atau usaha	Monitoring langsung	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Februari-November 2023		
3	Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009	Monitoring langsung atau memberikan arahan kepada pelaku usaha	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Jabuar -Desember 2023		
4	Melaksanakan pengujian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,	Monitoring langsung	Kepala Bidang Pengendalian, pencemaran Lingkungan Konservasi dan Perubahan Iklim	Februari - Desember 2023		
5	Melaksanakan pembinaan terhadap Kegiatan/usaha untuk melaksanakan pengelolaan kualitas limbah	Pemantauan berkelanjutan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Maret - Desember 2023		
6	Melaksanakan Sosialisasi terkait sampah spesifik rumah tangga	Identifikasi timbulan sampah spesifik rumah tangga	Kepala Bidang Pengendalian, pencemaran Lingkungan Konservasi dan Perubahan Iklim	Januari - Desember 2023		

7	menyurati pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan atau usaha untuk menyusun dokumen DELH atau DPLH (bagi kegiatan pemerintah) dan memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menyusun DELH atau DELH (bagi kegiatan swasta)	Monitoring langsung atau memberikan arahan kepada pelaku usaha	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Maret - Desember 2023		
8	Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang melanggar perizinan lingkungan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2021	Monitoring langsung atau memberikan arahan kepada pelaku usaha	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Maret - Desember 2023		
9	Melaksanakan Sosialisasi untuk memberikan informasi dan desiminasi peraturan perundangan terbaru kepada pelaku usaha / kegiatan, terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan serta sanksi yang di dapat bila terjadi pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus mencari jalan keluar bila terjadi kendala dan hambatan.	Monitoring langsung atau memberikan arahan kepada pelaku usaha	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Oktober - Desember 2022		
10	Memfasilitasi media Pengaduan yaitu melalui media pengaduan berupa telepon, surat, surat elektronik, faksimile, pesan singkat, website, media sosial, aplikasi pengaduan dan media lain sesuai dengan perkembangan teknologi.	Melaksanakan survey/cek lapangan	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Januari - Desember 2023		
11	Monitoring dan Evaluasi ke lokasi penanaman pohon	Monitoring dan Evaluasi hasil penanaman	Kepala Bidang PPLKPI	April - Desember 2023		
12	Sosialisasi kepada masyarakat terkait retribusi sampah serta peningkatan sumber daya manusia di bidang persampahan	Pelaksanaan kegiatan perbaikan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023		

13	Masyarakat menyiapkan satu wadah khusus untuk membuang sampah kemasan atau non organik agar tidak tercampur dengan sampah organik dan bisa dibawa ke Bank Sampah atau TPS 3R	Monitoring Langsung	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Februari - Desember 2023		
14	Melaksanakan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkut sampah secara berkala serta Pengadaan Armada Pengangkut Sampah yang baru	Pelaksanaan kegiatan perbaikan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Februari - Desember 2023		
15	Dilaksanakannya sosialisasi/penyuluhan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja baik dari segi jenis, fungsi dan manfaat. Sehingga petugas kebersihan pengangkut sampah belum memahami pengetahuan kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik.	Monitoring Langsung	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023		
16	Melaksanakan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkut sampah secara berkala serta Pengadaan Armada Pengangkut Sampah yang baru	Pelaksanaan kegiatan perbaikan	Kepala UPTD TPAS Galuga	Januari - Desember 2023		
17	Adanya pemeliharaan Alat berat secara rutin	Pelaksanaan kegiatan perbaikan	Kepala UPTD TPAS Galuga	Januari - Desember 2023		
18	Adanya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk control landfill	Pelaksanaan kegiatan perbaikan	Kepala UPTD TPAS Galuga	Januari - Desember 2023		
19	Dalam menjalankan tugasnya petugas kebersihan harus menerapkan SOP Penyapu jalan	Monitoring Langsung	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023		

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Penilaian resiko dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mencakup Bidang-bidang yang terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Penyusunan Penilaian resiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan identifikasi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Pihak-pihak yang melakukan penilaian resiko pada tataran kegiatannya telah menetapkan daftar resiko yang terdiri dari 83 pernyataan resiko. Selanjutnya terhadap resiko tersebut disusun dalam bentuk analisis tentang kemungkinan dan dampak atas resiko yang akan terjadi di tataran kegiatan, selanjutnya hasil dari pernyataan resiko dibuat daftar resiko prioritas untuk prioritas dengan skala lebih dari 4 (empat) dengan jumlah resiko prioritas sebanyak 19 (Sembilan belas) resiko prioritas dengan analisis penyebab dan dampaknya.

Dokumen Penilaian Resiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian resiko di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko. Penilaian resiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian resiko terdiri atas identifikasi resiko dan analisis resiko.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Semua Perangkat daerah dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa resiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Bogor umumnya, dan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor secara khusus.

Bogor, Januari 2023



DENNI WISMANTO, S.E., M.M.  
Pembina Tk. I - IV/b  
NIP. 19660622 200604 1 003

**LAMPIRAN**

## IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Bogor											
Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup											
Tahun Penilaian : 2023											
Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2019-2024)											
Urusan Pemerintahan : Urusan Lingkungan Hidup											
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
				Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara	Berkurangnya peran aktif dari masyarakat/Kelompok/Kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	RSO. 01.11.01	Kepala Bidang TL	Menurunnya kepedulian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Eksternal	C	Lingkungan menjadi kotor dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit	DLH Masyarakat	
			Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	RSO. 01.11.02	Kepala Bidang TL	Tingkat pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup masih rendah	Eksternal	C	Terjadinya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat/pelaku usaha di Kota Bogor dan tidak tersosialisasikannya pengelolaan lingkungan hidup	DLH Masyarakat	
			Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian dan peternakan	RSO. 01.11.03	Kepala Bidang PPLKPI	Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan/ masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Eksternal	C	Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kota Bogor	DLH Masyarakat	
			Menurunnya kualitas udara ambient;	RSO. 01.11.04	Kepala Bidang PPLKPI	Semakin banyaknya aktivitas kendaraan bermotor di jalan raya	Eksternal	C	Menurunnya kesehatan masyarakat	DLH Masyarakat	
			Meningkatnya emisi gas rumah kaca;	RSO. 01.11.05	Kepala Bidang PPLKPI	Meningkatnya gas emisi dari asap kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik	Eksternal	C	Meningkatnya rata-rata suhu permukaan bumi	Masyarakat	
	Sasaran Strategis OPD : Terkendalnya Kualitas Air dan Udara	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota.	RSO. 01.11.06	Kabid Pengelolaan persampahan	Masyarakat belum melakukan pemilah sampah di sumber	Internal	C	Semakin banyaknya timbunan sampah yang diangkut ke TPA	DLH, Masyarakat	
			Persentase Reduksi Sampah	Tidak maksimal nya PAD Kota Bogor dari Sektor Retribusi Persampahan	RSO. 01.11.07	Kabid Pengelolaan persampahan	Berkurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam pembayaran retribusi sampah	Internal	C	Berkurangnya retribusi sampah yang masuk ke kas negara	DLH, Masyarakat
			Tidak terangkutnya sampah ke TPA Galuga	RSO. 01.11.08	Kabid Pengelolaan persampahan	Terbatasnya sarana dan prasarana armada pengangkut sampah	Internal	C	Menumpuknya Sampah di tempat-tempat penampungan sampah sementara dan/atau TPS Container	DLH, Masyarakat	





## IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Bogor  
 Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Periode yang dinilai : 2023  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Lingkungan Hidup

No	Tujuan Strategis / Sasaran Strategis	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sub Kegiatan)	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
				Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
						Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Tujuan Strategis : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup												
	Sasaran Strategis OPD : Terkendalinya Kualitas Air dan Udara												
	Program : Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Perencanaan	kurangnya jumlah sekolah yang diusulkan sebagai calon sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.01	Kabid Tata Lingkungan	Tidak banyak sekolah memenuhi kriteria calon sekolah Adiwiyata	Eksternal	C	Kota Bogor tidak dapat mengirimkan sekolah yang diikutsertakan sebagai sekolah Adiwiyata	DLH, Sekolah	
				Pelaksanaan	Sekolah belum optimal menerapkan semua kriteria sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.02	Kabid Tata Lingkungan	Keterbatasan SDM	Eksternal	C	Jumlah mengikuti sekolah adiwiyata berkurang	DLH, Sekolah	
				Evaluasi	Ketidaksiapan sekolah mengikuti Adiwiyata	ROO.01.11.03	Kabid Tata Lingkungan	Kurangnya dukungan sekolah	Eksternal	C	Tidak tercapai target RPJMD	DLH, Sekolah	
	Program : Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Perencanaan	Kurang sesuai materi dengan kondisi masyarakat	ROO.01.11.04	Kabid Tata Lingkungan	Kebutuhan masyarakat yang berbeda	Internal	C	Kurangnya daya tarik masyarakat untuk mengikuti bintek	DLH, Masyarakat	
				Pelaksanaan	Kurangnya minat peserta	ROO.01.11.05	Kabid Tata Lingkungan	Materi kurang menarik minat masyarakat	Internal	C	Jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya tidak sesuai target	DLH, Pelaku usaha/kegiatan	
				Evaluasi	Kurangnya pemahaman terhadap materi	ROO.01.11.06	Kabid Tata Lingkungan	Kurangnya pengalaman masyarakat	Internal	C	Kesadaran masyarakat tidak meningkat	DLH, Pelaku usaha/kegiatan	
				Perencanaan	Adanya ketidakpahaman pelaku usaha untuk pengurusan dokumen lingkungan untuk penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha	ROO.01.11.07	Kabid Tata Lingkungan	Masih belum Sinkronnya peraturan terkait lingkungan hidup dan perizinan berusaha	Internal	C	Pelaku usaha/Kegiatan tidak menyusun Dokumen Lingkungan saat mengajukan persyaratan perizinan berusaha	DLH, Pelaku usaha/kegiatan	
				Pelaksanaan	Pelaku usaha/kegiatan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang disyaratkan di dokumen lingkungan	ROO.01.11.08	Kabid Tata Lingkungan	Pelaku usaha/kegiatan belum memahami isi dokumen lingkungan	Eksternal	C	Terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	DLH, Pelaku usaha/kegiatan	

No	Tujuan Strategis / Sasaran Strategis	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sub Kegiatan)	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
				Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
						Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Evaluasi	Ketidaksiharian dokumen lingkungan yang harus disusun oleh pelaku usaha/kegiatan	ROO.01.11.09	Kabid Tata Lingkungan	Mereka kesulitan dalam menentukan jenis dokumen yang harus disusun	Eksternal	C	Dokumen lingkungan yang disusun tidak sesuai dengan yang disyaratkan sehingga persetujuan lingkungan tidak dapat dikeluarkan	DLH, Pelaku usaha/kegiatan	
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Pelaksanaan	Peringatan hari besar tidak dilaksanakan	ROO.01.11.10	Kabid Tata Lingkungan	Kurangnya persiapan panitia dalam penyusunan materi acara	Eksternal	C	Tidak ada peringatan hari besar lingkungan hidup	DLH, Masyarakat	
				Pelaksanaan	Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti peringatan hari besar lingkungan hidup	ROO.01.11.11	Kabid Tata Lingkungan	Kegiatan yang dikemas kurang menarik	Internal	C	Peserta kegiatan menjadi berkurang	DLH, Masyarakat	
				Evaluasi	Pelaksanaan hari besar lingkungan hidup tidak optimal	ROO.01.11.12		Materi pelaksanaan hari besar lingkungan tidak sesuai dengan tema	Internal	C	Edukasi terhadap masyarakat kurang optimal	DLH, Masyarakat	
Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Perencanaan	Tidak terlaksananya pengujian sesuai dengan musim	ROO.01.11.13	Kabid PPLKPI	Cuaca yang tidak menentu	Eksternal	C	Pelaksanaan pekerjaan terhambat	DLH, Masyarakat		
				Pelaksanaan	Lokasi Pengujian Sulit di capai	ROO.01.11.14		Lokasinya menuruni tebing dan melewati tanah kosong	Internal	C	Pengambilan sample sulit dilakukan	DLH, Masyarakat	
				Pelaksanaan	Hasil Pengujian kualitas air dibawah baku mutu	ROO.01.11.15		Kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah yang dibuang ke sungai meningkat serta buangan dari rumah tangga yang masuk ke sungai	Eksternal	C	Kondisi air sungai menjadi tercemar	DLH, Masyarakat	
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Kurang Akurat dan Terpercaya terkait hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca	ROO.01.11.16	Kabid PPLKPI	- Ketersediaan Data yang diperlukan belum optimal - Misinterpretasi dalam metode perhitungan yang digunakan dalam penyusunan dokumen - Belum adanya Petunjuk teknis di beberapa sektor dalam perhitungan inventarisasi - Perbedaan asumsi yang digunakan dalam penyusunan dokumen kajian	Internal	C	Kurang Terkendalinya sumber sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan	DLH, Masyarakat		
	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi											
				Pelaksanaan	Laporan hasil kajian Rehabilitasi lahan dan konservasi di DAS Cisadane kurang tajam	ROO.01.11.17		Tenaga ahli yang kurang kompeten dan kurangnya data-data	Internal	C	laporan hasil kajian tidak maksimal	DLH, Masyarakat	

No	Tujuan Strategis / Sasaran Strategis	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sub Kegiatan)	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
				Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
						Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3 Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Perencanaan	Tidak Teridentifikasi nya timbunan sampah spesifik rumah tangga di Kota Bogor	ROO.01.11.18	Kabid PPLKPI	Belum ada data (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	Internal	C	Pencemaran lingkungan langsung maupun tidak langsung	DLH, Masyarakat	
				Pelaksanaan	Lamanya waktu pengumpulan data timbunan sampah spesifik rumah tangga (Sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.19	Kabid PPLKPI	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sampah spesifik rumah tangga	eksternal	C	menurunnya kesehatan masyarakat	DLH, Masyarakat	
				Evaluasi	Meningkatnya jumlah timbunan sampah spesifik rumah tangga (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.20	Kabid PPLKPI	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait jenis sampah yang masuk ke dalam sampah spesifik rumah tangga	Internal	C	Terjadinya penumpukan sampah spesifik rumah tangga yang belum dipilah	DLH, Masyarakat	
		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPHL yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan	Banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki perizinan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.01.11.21	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Adanya temuan ketidakpatuhan pelaku usaha/kegiatan terhadap kewajiban yang ada di peaturan perundangan lingkungan	Eksternal	C	Pelaku usaha/Kegiatan dalam menjalankan kegiatan usahanya melanggar perizinan lingkungan	DLH, Pelaku usaha/kegiatan	
				Pelaksanaan	Adanya pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha	ROO.01.11.22	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Pelaku usaha/Kegiatan kurang mendapat informasi terkait peraturan tata cara pengelolaan izin lingkungan	Internal	C	Kegiatan/usaha tidak memiliki perizinin lingkungan	DLH, Pelaku usaha/kegiatan	
				Pelaksanaan	Pelaku usaha/kegiatan tidak memiliki dokumen lingkungan	ROO.01.11.23	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Ketidaktaatan pelaku usaha/usaha terhadap peraturan lingkungan hidup	Eksternal	C	Pelaku usaha/Kegiatan dalam menjalankan kegiatan usahanya melanggar perizinan lingkungan	DLH, Pelaku usaha/kegiatan	
				Evaluasi/Pelaporan	Tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha/kegiatan dalam ketaatan perizinan lingkungan	ROO.01.11.24	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Dokumen perizinan lingkungan disamakan dengan perizinan yang lainnya	Eksternal	C	Meningkatnya pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan/usaha		
	Program: Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Perencanaan	Jumlah pengaduan masyarakat belum diketahui	ROO.01.11.25	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Banyaknyapengaduan terkait pencemaran lingkungan yang masuk	Internal	C	Terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	DLH, Pelaku usaha/kegiatan dan Masyarakat	
				Pelaksanaan	Meningkatnya jumlah pengaduan lingkungan hidup	ROO.01.11.26	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Eksternal	C	Semakin banyaknya pengaduan lingkungan hidup yang masuk dan mengakibatkan tidak terselesaikannya pengaduan lingkungan hidup	DLH, Pelaku usaha/kegiatan dan Masyarakat	
				Evaluasi/Pelaporan	Tidak terkendalinya sumber Pencemar	ROO.01.11.27	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya Pencemaran Lingkungan Hidup	Eksternal	C	Tidak terkendalinya Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	DLH, Pelaku usaha/kegiatan dan Masyarakat	

No	Tujuan Strategis / Sasaran Strategis	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sub Kegiatan)	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
				Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
						Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Program : Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Kegiatan : Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Perencanaan	Penentuan titik lokasi penanaman yang sesuai kriteria semakin sulit di dapatkan	ROO.01.11.28	Kabid PPLKPI	- Belum tersedianya data terkait lokasi penanaman yang mutakhir - Banyak terjadi perubahan fungsi lahan	Internal	C	tidak meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	Kepala DLH , Masyarakat	
				Pelaksanaan	Pohon yang di tanam di daerah konservasi mati/kering	ROO.01.11.29		kurangnya perhatian dari petugas pemeliharaa pohon	Internal	C	Pemeliharaan pohon tidak berjalan dengan baik		
	Sasaran Strategis : Meningkatnya Pelayanan Persampahan												
	Program : Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan : Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan : Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Perencanaan	Belum tercukupinya pemeliharaan sarana dan prasarana di TPS 3R	ROO.01.11.30	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Banyaknya sarana dan prasarana TPS 3R yang mengalami kerusakan	Internal	C	Belum optimal dalam pemilahan sampah	DLH, Masyarakat	
				Pelaksanaan	Tidak dihasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah di TPS 3R	ROO.01.11.31	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Tidak ada sarana pengelompokan sampah organik dan non organik	Eksternal	C	Tercampurnya sampah organik dan organik di TPS 3R	DLH, Masyarakat	
				Evaluasi/Pelaporan	Masih tercampurnya sampah organik dan non organik dari sumber	ROO.01.11.32	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Kurangnya edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah dari rumah	Internal	C	Sampah masih belum terpilah	DLH, Masyarakat	
		Kegiatan : Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Perencanaan	Kendaraan Pengangkut sampah Rusak	ROO.01.11.33	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Tidak terpeliharanya kendaraan kendaraan operasional pengangkut sampah dan umur kendaraan pengangkut sampah yang sudah tua	Internal	C	Kendaraan tidak bisa dipakai untuk mengangkut sampah	DLH, Masyarakat	
				Pelaksanaan	Tidak terangkutnya sampah	ROO.01.11.34	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Armada kendaraan pengangkut sampah Rusak	Internal	C	Terjadinya pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah di TPS	DLH, Masyarakat	
				Pelaksanaan	Petugas Kebersihan pengangkut sampah terkena penyakit	ROO.01.11.35	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Sampah yang menumpuk di Truk dan asap kendaraan bermotor di jalanan	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan pengangkutan sampah	DLH, Masyarakat	
				Evaluasi	Terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS	ROO.01.11.36	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Kendaraan pengangkut sampah yang rusak (mogok)	Internal	C	terjadi pencemaran lingkungan (sampah di TPS di hinggapai alat) dan	DLH, Masyarakat	
		Kegiatan : Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Perencanaan	Adanya gagal lelang pekerjaan konsultansi perencanaan	ROO.01.11.37	Kepala UPTD TPA Galuga	Banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria	Eksternal	C	Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan	DLH, Masyarakat	
				Pelaksanaan	Adanya Keterlambatan dalam pengerjaan Controll Landfill	ROO.01.11.38	Kepala UPTD TPA Galuga	Curah hujan tinggi dan terkendala kurangnya alat berat	Internal	C	Pekerjaan akan menjadi bertambah lama tidak sesuai target yang telah ditetapkan serta dapat mengganggu lingkungan.	DLH, Masyarakat	



No	Tujuan Strategis / Sasaran Strategis	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sub Kegiatan)	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
				Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
						Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sasaran Strategis : Meningkatnya Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan		Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)										
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan	Kekurangan Tenaga ASN DLH	ROO.01.11.51	Sekretaris Dinas	keterlambatan dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi Tupoksi	Internal	C	Tidak terlaksananya tugas Pelayanan Lingkup Dinas Lingkungan Kota Bogor	DLH	
				Pelaksanaan	Tidak terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	ROO.01.11.52	Sekretaris Dinas	Pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan telat	Internal	C	ASN tidak bekerja secara optimal	DLH	
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	Tidak memiliki data evaluasi kinerja	ROO.01.11.53	Sekretaris Dinas	Belum ada data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh BPS atau Disdukcapil	Internal	C	Tidak bisa melakukan perhitungan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah	DLH	
				Pelaksanaan	Analisis data capaian kinerja tidak tajam	ROO.01.11.54	Sekretaris Dinas	Kurangnya kompetensi Sumber daya manusia untuk menyusun laporan	Internal	C	Laporan tidak akuntabel dan transparan	DLH	
				Evaluasi	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja	ROO.01.11.55	Sekretaris Dinas	Kurangnya kordinasi dengan bidang-bidang	Internal	C	Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaporkan dengan baik	DLH	
				Pelaporan	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dapat selesai tepat waktu	ROO.01.11.56	Sekretaris Dinas	data Base yang masih kurang	Internal	C	Perangkat daerah tidak memiliki Dokumen Evaluasi kinerja	DLH	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perencanaan	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.57	Sekretaris Dinas	Tidak ada dokumen rincian kebutuhan barang	Internal	C	Terganggunya pekerjaan kantor	DLH	
				Pelaksanaan	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.58	Sekretaris Dinas	Persediaan barang habis sehingga satuan harga meningkat	Eksternal	UC	Terganggunya pekerjaan kantor	DLH	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Perencanaan	Tidak Tersedianya Peralatan rumah tangga	ROO.01.11.59	Sekretaris Dinas	Adanya kenaikan harga barang yang melebihi anggaran	Internal	C	Terhambatnya Kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	DLH	
				Pelaksanaan	Adanya jumlah kenaikan kebutuhan operasional	ROO.01.11.60	Sekretaris Dinas	Kebutuhan bersifat dinamis dan tidak bisa diprediksi secara akurat	Internal	C	tidak terfasilitasinya serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kantor, sehingga pelaksanaan tupoksi menjadi tidak optimal	DLH	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Perencanaan	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.61	Sekretaris Dinas	Persediaan barang habis sehingga satuan harga meningkat	Internal	C	Terhambatnya Kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	DLH	
				Pelaksanaan	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.62	Sekretaris Dinas	Adanya kenaikan harga barang yang melebihi anggaran	Internal	C	tidak terfasilitasinya serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kantor, sehingga pelaksanaan tupoksi menjadi tidak optimal	DLH	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Perencanaan	Kesalahan dalam menentukan jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan	ROO.01.11.63	Sekretaris Dinas	Kesulitan dalam memprediksi kebutuhan barang cetak dan penggandaan dalam tahun berjalan	Internal	C	Terhambatnya Kinerja Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	DLH	
				Pelaksanaan	Barang discontinue (tidak tersedia)	ROO.01.11.64	Sekretaris Dinas	Harga pasar yang fluktuatif dan membutuhkan waktu yang lama	Internal	UC	tidak terfasilitasinya serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kantor, sehingga pelaksanaan tupoksi menjadi tidak optimal	DLH	

No	Tujuan Strategis / Sasaran Strategis	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sub Kegiatan)	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
				Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
						Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan	Kurang tepatnya dalam penyusunan rincian anggaran perjalanan dinas	ROO.01.11.65	Sekretaris Dinas	Agenda kegiatan bersifat perkiraan	Internal	UC	Kegiatan kedinasan tidak terakomodir seluruhnya	DLH	
				Penganggaran	Perjalanan dinas tidak dapat dibiayai	ROO.01.11.66	Sekretaris Dinas	Perubahan lokasi kegiatan yang mendadak dan tidak ada alokasi anggaran	Internal	UC	Tidak terlaksananya kegiatan kedinasan	DLH	
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan	Adanya jumlah kenaikan pemakaian listrik	ROO.01.11.67	Sekretaris Dinas	Penggunaan listrik yang berlebihan atau tidak hemat energi	Internal	UC	Tidak terbayarkannya beban tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DLH	
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Perencanaan	Perekrutan pegawai Non PNS tidak sesuai kualifikasi	ROO.01.11.68	Sekretaris Dinas	Berkas persyaratan calon pegawai yang diterima tidak lengkap	Internal	C	Tidak terpenuhinya tenaga Non PNS/kurangnya SDM yang kompeten	DLH	
				Pelaksanaan	Kekurangan anggaran gaji non ASN	ROO.01.11.69	Sekretaris Dinas	Bertambahnya pegawai non ASN	Internal	C	Tidak terbayarkannya gaji non ASN	DLH	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Perencanaan	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan	ROO.01.11.70	Sekretaris Dinas	Ketelodaran dalam pencatatan masa habis jangka waktu pembayaran pajak kendaraan	Internal	C	Mengakibatkan pembayaran denda	DLH	
				Pelaksanaan	Pengadministrasian tidak tepat waktu dan pemeliharaan tidak sesuai perencanaan	ROO.01.11.71	Sekretaris Dinas	Keterbatasan sumber daya yang kompeten dan kemungkinan terjadi kerusakan suku cadang diluar perencanaan	Internal	C	Terlambatnya pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan dan kurang maksimalnya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	DLH	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	Perencanaan	Bertambahnya bangunan gedung kantor yang harus diperbaiki karena terjadinya kerusakan di luar rencana yang sudah ditentukan	ROO.01.11.72	Sekretaris Dinas	Terjadinya hujan lebat yang terus menerus	Eksternal	C	tidak terfasilitasinya serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kantor, sehingga pelaksanaan tupoksi menjadi tidak optimal	DLH	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pelaksanaan	Adanya kerusakan gedung kantor dan bangunan di luar dari rencana pemeliharaan	ROO.01.11.73	Sekretaris Dinas	Adanya faktor alam (bencana & cuaca)	Internal	UC	Penurunan kualitas bangunan/gedung kantor	DLH	

No	Tujuan Strategis / Sasaran Strategis	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sub Kegiatan)	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
				Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
						Risiko							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pelaksanaan	'Adanya kerusakan prasarana penunjang gedung kantor di luar rencana pemeliharaan	ROO.01.11.74	Sekretaris Dinas	Adanya faktor alam (bencana & cuaca)	Internal	C	Mengurangi estetika gedung kantor	DLH	
	Tujuan Strategis : Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH												
	Sasaran Strategis: Meningkatkan Pendayagunaan Data dan Informas SDA dan Lingkungan Hidup Untuk Kepentingan Pengendalian Pembangunan												
	Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Pelaksanaan	Tidak tersusunnya Kerangka Acuan Kerja yang sesuai dengan pedoman	ROO.01.11.75		Minimnya kompetensi pegawai menyusun kerangka kerja	Internal	C	Hasil kajian tidak optimal	DLH	
				Pelaksanaan	Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan upaya yang telah dilakukan Kota Bogor dalam pengelolaan lingkungannya	ROO.01.11.76	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Kurangnya data-data yang diperlukan untuk Penyusunan dokumen	Internal	C	Tidak dapat menjadi sumber informasi dalam menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Bogor	DLH	
		Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Pelaksanaan	Muatan dalam Dokumen KLHS RPJMD tidak lengkap	ROO.01.11.77	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Kurangnya data-data yang diperlukan untuk Penyusunan dokumen	Internal	C	Dokumen KLHS RPJMD kurang implementatif dan tidak sesuai dengan pedoman yang dipersyaratkan	DLH	



## HASIL ANALISA RISIKO TERHADAP DAMPAK

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Bogor						
Nama Perangkat Daerah		: Dinas Lingkungan Hidup						
Tahun Penilaian		: 2022						
Urusan Pemerintahan		: Urusan Lingkungan Hidup						
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisa Risiko Terhadap Dampak					Rata-rata skor Dampak
			Skor ke.1 Dampak	Skor ke.2 Dampak	Skor ke.3 Dampak	Skor ke.4 Dampak	Skor ke.5 Dampak	
1	2	3	4					5
A	<b>Tujuan Strategis</b>							
	Tujuan Strategis : 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup							
I	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Berkurangnya peran aktif dari masyarakat/Kelompok/Kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	RSO. 01.11.01	2	1	3	2	3	2,2
2	Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	RSO. 01.11.02	2	2	2	3	1	2
	Tujuan Strategis : 2 Terkendalinya Kualitas Air dan Udara							
II	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian dan peternakan	RSO. 01.11.01	2	2	2	3	1	2
2	Menurunnya kualitas udara ambien;	RSO. 01.11.02	2	2	2	3	1	2
3	Meningkatnya emisi gas rumah kaca;	RSO. 01.11.03	2	2	2	3	2	2,2
III	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>							
1	Kurangnya jumlah sekolah yang diusulkan sebagai calon sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.01	2	2	3	2	2	2,2
2	Sekolah belum optimal menerapkan semua kriteria sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.02	3	2	2	3	2	2,4
3	Ketidaksiapan sekolah mengikuti Adiwiyata	ROO.01.11.03	3	3	3	3	3	3
4	Kurang sesuai materi dengan kondisi masyarakat	ROO.01.11.04	2	1	1	1	1	1,2
5	Kurangnya minat peserta	ROO.01.11.05	1	1	3	2	1	1,6
6	Kurangnya pemahaman terhadap materi	ROO.01.11.06	1	1	1	1	1	1
7	Adanya ketidakpahaman pelaku usaha untuk pengurusan dokumen lingkungan untuk penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha	ROO.01.11.07	4	3	3	3	3	3,2
8	Pelaku usaha/kegiatan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang disyaratkan di dokumen lingkungan	ROO.01.11.08	4	3	3	4	3	3,4
9	Ketidaksesuaian dokumen lingkungan yang harus disusun oleh pelaku usaha/kegiatan	ROO.01.11.09	2	2	2	3	2	2,2
10	Peringatan hari besar tidak dilaksanakan	ROO.01.11.10	2	1	2	2	2	1,8
11	Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti peringatan hari besar lingkungan hidup	ROO.01.11.11	2	2	3	1	1	1,8
12	Pelaksanaan hari besar lingkungan hidup tidak optimal	ROO.01.11.12	3	2	2	2	2	2,2
13	Tidak terlaksananya pengujian sesuai dengan musim	ROO.01.11.13	3	4	2	3	2	2,8
14	Lokasi Pengujian Sulit di capai	ROO.01.11.14	3	1	2	2	1	1,8
15	Hasil Pengujian kualitas air dibawah baku mutu	ROO.01.11.15	3	2	2	3	2	2,4
16	Kurang Akurat dan Terpercaya terkait hasil Invetarisasi Gas Rumah Kaca	ROO.01.11.16	3	1	2	2	2	2
17	Laporan hasil kajian Rehabilitasi lahan dan konservasi di DAS Cisadane kurang tajam	ROO.01.11.17	3	2	2	2	2	2,2
18	Tidak Teridentifikasi nya timbunan sampah spesifik rumah tangga di Kota Bogor	ROO.01.11.18	3	1	2	1	2	1,8
19	Lamanya waktu pengumpulan data timbunan sampah spesifik rumah tangga (Sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.19	1	1	2	2	2	1,6
20	Meningkatnya jumlah timbunan sampah spesifik rumah tangga (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.20	3	2	2	2	2	2,2
21	Banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki perizinan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.01.11.21	3	2	2	2	2	2,2
22	Adanya pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha	ROO.01.11.22	3	3	2	3	4	3
23	Pelaku usaha/kegiatan tidak memiliki dokumen lingkungan	ROO.01.11.23	2	1	2	1	2	1,6
24	Tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha/kegiatan dalam ketaatan perizinan lingkungan	ROO.01.11.24	3	2	2	2	2	2,2
25	Jumlah pengaduan masyarakat belum diketahui	ROO.01.11.25	3	2	2	2	2	2,2
26	Meningkatnya jumlah pengaduan lingkungan hidup	ROO.01.11.26	3	2	2	2	2	2,2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisa Risiko Terhadap Dampak					Rata-rata skor Dampak
			Skor ke.1 Dampak	Skor ke.2 Dampak	Skor ke.3 Dampak	Skor ke.4 Dampak	Skor ke.5 Dampak	
1	2	3	4					5
27	Tidak terkendalinya sumber Pencemar	ROO.01.11.27	2	1	2	2	2	1,8
28	Penentuan titik lokasi penanaman yang sesuai kriteria semakin sulit di dapatkan	ROO.01.11.28	2	2	2	2	1	1,8
29	Pohon yang di tanam di daerah konservasi mati/kering	ROO.01.11.29	3	2	2	2	2	2,2
<b>I Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>								
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota.	RSO. 01.11.06	3	2	2	1	2	2
2	Tidak maksimal nya PAD Kota Bogor dari Sektor Retribusi Persampahan	RSO. 01.11.07	3	2	2	1	2	2
3	Tidak terangkutnya sampah ke TPA Galuga	RSO. 01.11.08	2	2	3	1	2	2
4	Sistem Penutupan sampah dengan Ilapisan tanah (control Landfill) tidak dapat dilaksanakan	RSO. 01.11.09	3	2	2	1	2	2
<b>II Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>								
1	Belum tercukupinya pemeliharaan sarana dan prasarana di TPS 3R	ROO.01.11.30	1	2	2	1	2	1,6
2	Tidak dihasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah di TPS 3R	ROO.01.11.31	1	3	3	2	2	2,2
3	Masih tercampurnya sampah organik dan non organik dari sumber	ROO.01.11.32	3	3	3	3	3	3
4	Kendaraan Pengangkut sampah Rusak	ROO.01.11.33	2	2	2	2	2	2
5	Tidak terangkutnya sampah	ROO.01.11.34	2	3	2	2	2	2,2
6	Petugas Kebersihan pengangkut sampah terkena penyakit	ROO.01.11.35	3	2	2	4	2	2,6
7	Terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS	ROO.01.11.36	3	2	4	2	2	2,6
8	Adanya gagal lelang pekerjaan konsultansi perencanaan	ROO.01.11.37	2	1	1	2	2	1,6
9	Adanya Keterlambatan dalam pengerjaan Controll Landfill	ROO.01.11.38	3	3	2	2	2	2,4
10	Titik lokasi pembangunan TPS belum jelas	ROO.01.11.39	1	2	2	1	2	1,6
11	Keterlambatan waktu pekerjaan pembangunan	ROO.01.11.40	3	3	2	2	2	2,4
12	Penumpukan Timbulan sampah di TPS	ROO.01.11.41	3	1	2	1	2	1,8
13	Rehabilitasi TPS belum bisa dilaksanakan	ROO.01.11.42	2	3	1	2	2	2
14	Keterbatasan SDM dalam pengerjaan rehabilitasi TPS	ROO.01.11.43	1	1	2	2	2	1,6
15	TPS tidak dapat digunakan untuk menampung sampah	ROO.01.11.44	2	1	2	1	2	1,6
16	Adanya alat berat yang tidak dapat diperbaiki	ROO.01.11.45	1	1	2	2	2	1,6
17	Pada saat pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba alat berat rusak	ROO.01.11.46	1	3	2	2	2	2
18	Pengelolaan sampah di TPA di Galuga tidak dapat dilaksanakan	ROO.01.11.47	3	3	2	2	2	2,4
19	Adanya gagal lelang pekerjaan penyediaan barang	ROO.01.11.48	2	1	2	2	2	1,8
20	Terjadinya Kecelakaan kerja pada saat petugas kebersihan menyapu jalan	ROO.01.11.49	3	2	2	2	2	2,2
21	Adanya keterlambatan proses pekerjaan	ROO.01.11.50	3	1	2	2	2	2
<b>B Tujuan Strategis</b>								
Tujuan Strategis : 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor								
<b>I Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>								
1	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas	RSO. 01.11.10	2	2	1	2	2	1,8
2	Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang di laporkan oleh DLH tidak sesuai dengan format yang telah di tetapkan	RSO. 01.11.11	1	1	2	2	2	1,6
<b>II Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>								
1	Kekurangan Tenaga ASN DLH	ROO.01.11.51	2	2	1	2	2	1,8
2	Tidak terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	ROO.01.11.52	1	3	2	2	1	1,8
3	Tidak memiliki data evaluasi kinerja	ROO.01.11.53	1	2	1	3	2	1,8
4	Analisis data capaian kinerja tidak tajam	ROO.01.11.54	2	2	3	1	3	2,2
5	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja	ROO.01.11.55	2	2	3	1	2	2
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dapat selesai tepat waktu	ROO.01.11.56	3	2	1	2	1	1,8
7	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.57	2	2	2	1	2	1,8
8	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.58	1	3	3	1	3	2,2
9	Tidak Tersedianya Peralatan rumah tangga	ROO.01.11.59	2	1	2	1	2	1,6
10	Adanya jumlah kenaikan kebutuhan operasional	ROO.01.11.60	2	3	2	3	1	2,2
11	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.61	1	1	2	1	2	1,4
12	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.62	2	2	1	2	2	1,8



## HASIL ANALISA RISIKO TERHADAP KEMUNGKINAN

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Bogor						
Nama Perangkat Daerah		: Dinas Lingkungan Hidup						
Tahun Penilaian		: 2023						
Urusan Pemerintahan		: Urusan Lingkungan Hidup						
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisa Risiko Terhadap Kemungkinan					Rata-rata skor Kemungkinan
			Skor ke.1 Kemungkinan	Skor ke.2 Kemungkinan	Skor ke.2 Kemungkinan	Skor ke.4 Kemungkinan	Skor ke.5 Kemungkinan	
1	2	3	4					5
A	<b>Tujuan Strategis</b>							
	Tujuan Strategis : 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup							
I	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Berkurangnya peran aktif dari masyarakat/Kelompok/Kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	RSO. 01.11.01	2	3	3	2	3	2,6
2	Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	RSO. 01.11.02	2	1	2	1	3	1,8
	Tujuan Strategis : 2							
II	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik,	RSO. 01.11.01	3	2	3	1	2	2,2
2	Menurunnya kualitas udara ambien;	RSO. 01.11.02	3	2	2	3	1	2,2
3	Meningkatnya emisi gas rumah kaca;	RSO. 01.11.03	2	2	1	2	1	1,6
III	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>							
1	Kurangnya jumlah sekolah yang diusulkan sebagai calon sekolah	ROO.01.11.01	1	2	1	2	2	1,6
2	Sekolah belum optimal menerapkan semua kriteria sekolah	ROO.01.11.02	1	2	2	1	2	1,6
3	Ketidaksiapan sekolah mengikuti Adiwiyata	ROO.01.11.03	2	1	1	1	1	1,2
4	Kurang sesuai materi dengan kondisi masyarakat	ROO.01.11.04	2	2	4	3	2	2,6
5	Kurangnya minat peserta	ROO.01.11.05	3	2	2	2	2	2,2
6	Kurangnya pemahaman terhadap materi	ROO.01.11.06	3	2	4	3	2	2,8
7	Adanya ketidakpahaman pelaku usaha untuk pengurusan dokumen lingkungan untuk penerbitan persetujuan lingkungan dan	ROO.01.11.07	3	2	4	3	3	3
8	Pelaku usaha/kegiatan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang disyaratkan di dokumen	ROO.01.11.08	2	2	4	3	1	2,4
9	Ketidaksesuaian dokumen lingkungan yang harus disusun oleh pelaku usaha/kegiatan	ROO.01.11.09	2	1	2	1	2	1,6
10	Peringatan hari besar tidak dilaksanakan	ROO.01.11.10	2	1	3	2	1	1,8
11	Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti peringatan hari besar lingkungan hidup	ROO.01.11.11	3	2	2	1	2	2
12	Pelaksanaan hari besar lingkungan hidup tidak optimal	ROO.01.11.12	1	1	2	2	2	1,6
13	Tidak terlaksananya pengujian sesuai dengan musim	ROO.01.11.13	2	2	2	3	2	2,2
14	Lokasi Pengujian Sulit di capai	ROO.01.11.14	2	1	2	2	2	1,8
15	Hasil Pengujian kualitas air dibawah baku mutu	ROO.01.11.15	3	3	2	1	2	2,2
16	Kurang Akurat dan Terpercaya terkait hasil Inventarisasi Gas Rumah	ROO.01.11.16	2	1	2	2	2	1,8
17	Laporan hasil kajian Rehabilitasi lahan dan konservasi di DAS Cisadane kurang tajam	ROO.01.11.17	1	1	2	3	2	1,8
18	Tidak Teridentifikasinya timbunan sampah spesifik rumah tangga di Kota Bogor	ROO.01.11.18	3	2	2	2	1	2
19	Lamanya waktu pengumpulan data timbunan sampah spesifik rumah tangga (Sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.19	2	2	2	3	2	2,2
20	Meningkatnya jumlah timbunan sampah spesifik rumah tangga (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.20	3	3	2	3	2	2,6
21	Banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki perizinan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.01.11.21	3	3	2	3	2	2,6
22	Adanya pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan	ROO.01.11.22	3	2	3	2	2	2,4
23	Pelaku usaha/kegiatan tidak memiliki dokumen lingkungan	ROO.01.11.23	3	2	2	1	2	2
24	Tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha/kegiatan dalam ketaatan perizinan lingkungan	ROO.01.11.24	4	3	2	3	3	3
25	Jumlah pengaduan masyarakat belum diketahui	ROO.01.11.25	1	1	2	2	2	1,6
26	Meningkatnya jumlah pengaduan lingkungan hidup	ROO.01.11.26	3	3	2	3	2	2,6
27	Tidak terkendalinya sumber Pencemar	ROO.01.11.27	3	2	2	2	2	2,2
28	Penentuan titik lokasi penanaman yang sesuai kriteria semakin sulit di dapatkan	ROO.01.11.28	3	2	2	1	2	2
29	Pohon yang di tanam di daerah konservasi mati/kering	ROO.01.11.29	3	3	2	3	2	2,6
I	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun	RSO. 01.11.06	3	2	2	1	1	1,8
2	Tidak maksimalnya PAD Kota Bogor dari Sektor Retribusi	RSO. 01.11.07	3	2	4	2	2	2,6
3	Tidak terangkutnya sampah ke TPA Galuga	RSO. 01.11.08	2	1	2	2	2	1,8
4	Sistem Penutupan sampah dengan lapisan tanah (control Landfill)	RSO. 01.11.09	3	2	2	1	1	1,8
II	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>							
1	Belum tercukupinya pemeliharaan sarana dan prasarana di TPS	ROO.01.11.30	3	2	2	1	2	2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisa Risiko Terhadap Kemungkinan					Rata-rata skor Kemungkinan
			Skor ke.1 Kemungkinan	Skor ke.2 Kemungkinan	Skor ke.2 Kemungkinan	Skor ke.4 Kemungkinan	Skor ke.5 Kemungkinan	
1	2	3	4					5
2	Tidak dihasilkannya produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah di TPS 3R	ROO.01.11.31	2	1	2	1	3	1,8
3	Masih tercampurnya sampah organik dan non organik dari sumber	ROO.01.11.32	2	3	1	2	3	2,2
4	Kendaraan Pengangkut sampah Rusak	ROO.01.11.33	2	3	4	3	3	3
5	Tidak terangkutnya sampah	ROO.01.11.34	3	1	2	2	1	1,8
6	Petugas Kebersihan pengangkut sampah terkena penyakit	ROO.01.11.35	2	2	4	3	2	2,6
7	Terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS	ROO.01.11.36	2	2	4	2	2	2,4
8	Adanya gagal lelang pekerjaan konsultasi perencanaan	ROO.01.11.37	1	1	2	2	2	1,6
9	Adanya Keterlambatan dalam pengerjaan Controll Landfill	ROO.01.11.38	3	3	4	3	3	3,2
10	Titik lokasi pembangunan TPS belum jelas	ROO.01.11.39	3	1	2	1	2	1,8
11	Keterlambatan waktu pekerjaan pembangunan	ROO.01.11.40	1	1	1	2	2	1,4
12	Penumpukan Timbulan sampah di TPS	ROO.01.11.41	1	1	2	3	3	2
13	Rehabilitasi TPS belum bisa dilaksanakan	ROO.01.11.42	1	1	2	2	2	1,6
14	Keterbatasan SDM dalam pengerjaan rehabilitasi TPS	ROO.01.11.43	1	1	2	3	3	2
15	TPS tidak dapat digunakan untuk menampung sampah	ROO.01.11.44	3	2	3	1	2	2,2
16	Adanya alat berat yang tidak dapat diperbaiki	ROO.01.11.45	2	2	2	2	2	2
17	Pada saat pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba alat berat rusak	ROO.01.11.46	3	2	4	2	2	2,6
18	Pengelolaan sampah di TPA di Galuga tidak dapat dilaksanakan	ROO.01.11.47	1	1	2	2	2	1,6
19	Adanya gagal lelang pekerjaan penyediaan barang	ROO.01.11.48	1	2	1	2	2	1,6
20	Terjadinya Kecelakaan kerja pada saat petugas kebersihan	ROO.01.11.49	3	2	4	2	2	2,6
21	Adanya keterlambatan proses pekerjaan	ROO.01.11.50	2	2	2	2	1	1,8
<b>B Tujuan Strategis</b>								
Tujuan Strategis : 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota								
<b>I Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>								
1	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas	RSO. 01.11.10	3	2	2	2	2	2,2
2	Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang di laporkan oleh DLH tidak sesuai dengan format yang telah di tetapkan	RSO. 01.11.11	3	2	2	3	2	2,4
<b>II Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>								
1	Kekurangan Tenaga ASN DLH	ROO.01.11.13	2	2	2	2	2	2
2	Tidak terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	ROO.01.11.14	1	3	2	2	1	1,8
3	Tidak memiliki data evaluasi kinerja	ROO.01.11.15	3	2	1	1	2	1,8
4	Analisis data capaian kinerja tidak tajam	ROO.01.11.16	1	2	2	1	2	1,6
5	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja	ROO.01.11.17	1	1	2	3	2	1,8
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dapat selesai tepat waktu	ROO.01.11.18	1	2	2	1	2	1,6
7	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.19	3	2	2	2	2	2,2
8	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.20	1	2	2	1	2	1,6
9	Tidak Tersedianya Peralatan rumah tangga	ROO.01.11.21	1	2	2	1	2	1,6
10	Adanya jumlah kenaikan kebutuhan operasional	ROO.01.11.22	1	2	2	1	2	1,6
11	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.23	3	2	2	2	2	2,2
12	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.24	2	2	2	3	2	2,2
13	Kesalahan dalam menentukan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	ROO.01.11.16	1	2	2	2	2	1,8
14	Barang discontinue (tidak tersedia)	ROO.01.11.17	2	2	2	2	1	1,8
15	Kurang tepatnya dalam penyusunan rincian anggaran perjalanan	ROO.01.11.18	3	2	2	2	1	2
16	Perjalanan dinas tidak dapat dibiayai	ROO.01.11.19	1	1	2	2	1	1,4
17	Adanya jumlah kenaikan pemakaian listrik	ROO.01.11.20	1	1	1	1	1	1
18	Perekrutan pegawai Non PNS tidak sesuai kualifikasi	ROO.01.11.21	2	1	2	1	1	1,4
19	Kekurangan anggaran gaji non ASN	ROO.01.11.22	2	3	2	2	1	2
20	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan	ROO.01.11.23	1	1	2	1	2	1,4
21	Pengadministrasian tidak tepat waktu dan pemeliharaan tidak sesuai perencanaan	ROO.01.11.24	2	2	1	2	2	1,8
22	Bertambahnya bangunan gedung kantor yang harus diperbaiki karena terjadinya kerusakan di luar rencana yang sudah ditentukan	ROO.01.11.25	3	2	1	2	2	2
23	Adanya kerusakan gedung kantor dan bangunan di luar dari rencana pemeliharaan	ROO.01.11.26	2	1	2	1	2	1,6
24	Adanya kerusakan prasarana penunjang gedung kantor di luar rencana pemeliharaan	ROO.01.11.27	2	1	2	1	2	1,6
<b>C Tujuan Strategis</b>								
Tujuan Strategis : 3 Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH								
<b>I Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>								

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisa Risiko Terhadap Kemungkinan					Rata-rata skor Kemungkinan
			Skor ke.1 Kemungkinan	Skor ke.2 Kemungkinan	Skor ke.2 Kemungkinan	Skor ke.4 Kemungkinan	Skor ke.5 Kemungkinan	
1	2	3	4					5
1	Masyarakat tidak dapat mengetahui dan/atau mengakses informasi	RSO.01.11.12	1	2	1	2	3	1,8
<b>II Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>								
1	Tidak tersusunnya Kerangka Acuan Kerja yang sesuai dengan	ROO.01.11.31	3	1	2	2	1	1,8
2	Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan upaya yang telah dilakukan Kota Bogor dalam pengelolaan lingkungannya	ROO.01.11.32	2	2	2	1	2	1,8
3	Muatan dalam Dokumen KLHS RPJMD tidak lengkap	ROO.01.11.33	3	3	2	3	2	2,6

Kertas Kerja  
HASIL ANALISIS RISIKO

<b>Nama Pemda</b>		: Pemerintah Daerah Kota Bogor			
<b>Nama Perangkat Daerah</b>		: Dinas Lingkungan Hidup			
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2023			
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: Urusan Lingkungan Hidup			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5
A	<b>Tujuan Strategis</b>				
	Tujuan Strategis : 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
I	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>				
1	Berkurangnya peran aktif dari masyarakat/Kelompok/Kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	RSO. 01.11.01	2,2	2,6	5,72
2	Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	RSO. 01.11.02	2	1,8	3,6
	Tujuan Strategis : 2 Terkendalinya Kualitas Air dan Udara				
II	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>				
1	Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian dan peternakan	RSO. 01.11.01	2	2,2	4,4
2	Menurunnya kualitas udara ambien;	RSO. 01.11.02	2	2,2	4,4
3	Meningkatnya emisi gas rumah kaca;	RSO. 01.11.03	2,2	1,6	3,52
II	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>				
1	Kurangnya jumlah sekolah yang diusulkan sebagai calon sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.01	2,2	1,6	3,52
2	Sekolah belum optimal menerapkan semua kriteria sekolah Adiwiyata	ROO.01.11.02	2,4	1,6	3,84
3	Ketidaksiapan sekolah mengikuti Adiwiyata	ROO.01.11.03	3	1,2	3,6
4	Kurang sesuai materi dengan kondisi masyarakat	ROO.01.11.04	1,2	2,6	3,12
5	Kurangnya minat peserta	ROO.01.11.05	1,6	2,2	3,52
6	Kurangnya pemahaman terhadap materi	ROO.01.11.06	1	2,8	2,8
7	Adanya ketidakpahaman pelaku usaha untuk pengurusan dokumen lingkungan untuk penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha	ROO.01.11.07	3,2	3	9,6
8	Pelaku usaha/kegiatan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang disyaratkan di dokumen lingkungan	ROO.01.11.08	3,4	2,4	8,16
9	Ketidaksesuaian dokumen lingkungan yang harus disusun oleh pelaku usaha/kegiatan	ROO.01.11.09	2,2	1,6	3,52
10	Peringatan hari besar tidak dilaksanakan	ROO.01.11.10	1,8	1,8	3,24
11	Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti peringatan hari besar lingkungan hidup	ROO.01.11.11	1,8	2	3,6
12	Pelaksanaan hari besar lingkungan hidup tidak optimal	ROO.01.11.12	2,2	1,6	3,52
13	Tidak terlaksananya pengujian sesuai dengan musim	ROO.01.11.13	2,8	2,2	6,16
14	Lokasi Pengujian Sulit di capai	ROO.01.11.14	1,8	1,8	3,24
15	Hasil Pengujian kualitas air dibawah baku mutu	ROO.01.11.15	2,4	2,2	5,28
16	Kurang Akurat dan Terpercaya terkait hasil Inventarisasi Gas Rumah Kaca	ROO.01.11.16	2	1,8	3,6
17	Laporan hasil kajian Rehabilitasi lahan dan konservasi di DAS Cisadane kurang tajam	ROO.01.11.17	2,2	1,8	3,96
18	Tidak Teridentifikasinya timbunan sampah spesifik rumah tangga di Kota Bogor	ROO.01.11.18	1,8	2	3,6
19	Lamanya waktu pengumpulan data timbunan sampah spesifik rumah tangga (Sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.19	1,6	2,2	3,52
20	Meningkatnya jumlah timbunan sampah spesifik rumah tangga (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.20	2,2	2,6	5,72
21	Banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki perizinan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.01.11.21	2,2	2,6	5,72
22	Adanya pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha	ROO.01.11.22	3	2,4	7,2
23	Pelaku usaha/kegiatan tidak memiliki dokumen lingkungan	ROO.01.11.23	1,6	2	3,2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5
24	Tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha/kegiatan dalam ketaatan perizinan lingkungan	ROO.01.11.24	2,2	3	6,6
25	Jumlah pengaduan masyarakat belum diketahui	ROO.01.11.25	2,2	1,6	3,52
26	Meningkatnya jumlah pengaduan lingkungan hidup	ROO.01.11.26	2,2	2,6	5,72
27	Tidak terkendalinya sumber Pencemar	ROO.01.11.27	1,8	2,2	3,96
28	Penentuan titik lokasi penanaman yang sesuai kriteria semakin sulit di dapatkan	ROO.01.11.28	1,8	2	3,6
29	Pohon yang di tanam di daerah konservasi mati/kering	ROO.01.11.29	2,2	2,6	5,72



No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5
<b>I Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>					
1	Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota.	RSO. 01.11.06	2	1,8	3,6
2	Tidak maksimal nya PAD Kota Bogor dari Sektor Retribusi Persampahan	RSO. 01.11.07	2	2,6	5,2
3	Tidak terangkutnya sampah ke TPA Galuga	RSO. 01.11.08	2	1,8	3,6
4	Sistem Penutupan sampah dengan lapisan tanah (control Landfill) tidak dapat dilaksanakan	RSO. 01.11.09	2	1,8	3,6
<b>II Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>					
1	Belum tercukupinya pemeliharaan sarana dan prasarana di TPS 3R	ROO.01.11.30	1,6	2	3,2
2	Tidak dihasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah di TPS 3R	ROO.01.11.31	2,2	1,8	3,96
3	Masih tercampurnya sampah organik dan non organik dari sumber	ROO.01.11.32	3	2,2	6,6
4	Kendaraan Pengangkut sampah Rusak	ROO.01.11.33	2	3	6
5	Tidak terangkutnya sampah	ROO.01.11.34	2,2	1,8	3,96
6	Petugas Kebersihan pengangkut sampah terkena penyakit	ROO.01.11.35	2,6	2,6	6,76
7	Terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS	ROO.01.11.36	2,6	2,4	6,24
8	Adanya gagal lelang pekerjaan konsultasi perencanaan	ROO.01.11.37	1,6	1,6	2,56
9	Adanya Keterlambatan dalam pengerjaan Controll Landfill	ROO.01.11.38	2,4	3,2	7,68
10	Titik lokasi pembangunan TPS belum jelas	ROO.01.11.39	1,6	1,8	2,88
11	Keterlambatan waktu pekerjaan pembangunan	ROO.01.11.40	2,4	1,4	3,36
12	Penumpukan Timbulan sampah di TPS	ROO.01.11.41	1,8	2	3,6
13	Rehabilitasi TPS belum bisa dilaksanakan	ROO.01.11.42	2	1,6	3,2
14	Keterbatasan SDM dalam pengerjaan rehabilitasi TPS	ROO.01.11.43	1,6	2	3,2
15	TPS tidak dapat digunakan untuk menampung sampah	ROO.01.11.44	1,6	2,2	3,52
16	Adanya alat berat yang tidak dapat diperbaiki	ROO.01.11.45	1,6	2	3,2
17	Pada saat pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba alat berat rusak	ROO.01.11.46	2	2,6	5,2
18	Pengelolaan sampah di TPA di Galuga tidak dapat dilaksanakan	ROO.01.11.47	2,4	1,6	3,84
19	Adanya gagal lelang pekerjaan penyediaan barang	ROO.01.11.48	1,8	1,6	2,88
20	Terjadinya Kecelakaan kerja pada saat petugas kebersihan menyapu jalan	ROO.01.11.49	2,2	2,6	5,72
21	Adanya keterlambatan proses pekerjaan	ROO.01.11.50	2	1,8	3,6
<b>B Tujuan Strategis</b>					
Tujuan Strategis : 2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor					
<b>I Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>					
1	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas	RSO. 01.11.10	1,8	2,2	3,96
2	Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang di laporkan oleh DLH tidak sesuai dengan format yang telah di tetapkan	RSO. 01.11.11	1,6	2,4	3,84
<b>II Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>					
1	Kekurangan Tenaga ASN DLH	ROO.01.11.13	1,8	2	3,6
2	Tidak terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	ROO.01.11.14	1,8	1,8	3,24
3	Tidak memiliki data evaluasi kinerja	ROO.01.11.15	1,8	1,8	3,24
4	Analisis data capaian kinerja tidak tajam	ROO.01.11.16	2,2	1,6	3,52
5	Tidak tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja	ROO.01.11.17	2	1,8	3,6
6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dapat selesai tepat waktu	ROO.01.11.18	1,8	1,6	2,88
7	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.19	1,8	2,2	3,96
8	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.20	2,2	1,6	3,52

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6 = 4 X 5
9	Tidak Tersedianya Peralatan rumah tangga	ROO.01.11.21	1,6	1,6	2,56
10	Adanya jumlah kenaikan kebutuhan operasional	ROO.01.11.22	2,2	1,6	3,52
11	Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.01.11.23	1,4	2,2	3,08
12	Ketersediaan barang dan harga yang fluktuatif	ROO.01.11.24	1,8	2,2	3,96
13	Kesalahan dalam menentukan jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	ROO.01.11.16	1,8	1,8	3,24
14	Barang discontinue (tidak tersedia)	ROO.01.11.17	1,6	1,8	2,88
15	Kurang tepatnya dalam penyusunan rincian anggaran perjalanan dinas	ROO.01.11.18	1,6	2	3,2
16	Perjalanan dinas tidak dapat dibiayai	ROO.01.11.19	1,8	1,4	2,52
17	Adanya jumlah kenaikan pemakaian listrik	ROO.01.11.20	2,4	1	2,4
18	Perekrutan pegawai Non PNS tidak sesuai kualifikasi	ROO.01.11.21	2,8	1,4	3,92
19	Kekurangan anggaran gaji non ASN	ROO.01.11.22	1,8	2	3,6
20	Keterlambatan pembayaran pajak kendaraan	ROO.01.11.23	1,8	1,4	2,52
21	Pengadministrasian tidak tepat waktu dan pemeliharaan tidak sesuai perencanaan	ROO.01.11.24	1,8	1,8	3,24
22	Bertambahnya bangunan gedung kantor yang harus diperbaiki karena terjadinya kerusakan di luar rencana yang sudah ditentukan	ROO.01.11.25	1,8	2	3,6
23	Adanya kerusakan gedung kantor dan bangunan di luar dari rencana pemeliharaan	ROO.01.11.26	1,8	1,6	2,88
24	Adanya kerusakan prasarana penunjang gedung kantor di luar rencana pemeliharaan	ROO.01.11.27	2	1,6	3,2
<b>C</b>	<b>Tujuan Strategis</b>				
	Tujuan Strategis : 3 Terwujudnya Kemudahan Akses Layanan SDA dan LH				
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>				
1	Masyarakat tidak dapat mengetahui dan/atau mengakses informasi terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor	RSO. 01.11.12	1,8	1,8	3,24
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>				
1	Tidak tersusunnya Kerangka Acuan Kerja yang sesuai dengan pedoman	ROO.01.11.31	2,2	1,8	3,96
2	Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menggambarkan kondisi lingkungan hidup dan upaya yang telah dilakukan Kota Bogor dalam pengelolaan lingkungannya	ROO.01.11.32	1,8	1,8	3,24
3	Muatan dalam Dokumen KLHS RPJMD tidak lengkap	ROO.01.11.33	1,4	2,6	3,64

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

<b>Nama Pemda</b>		: Pemerintah Daerah Kota Bogor				
<b>Nama Perangkat Daerah</b>		: Dinas Lingkungan Hidup				
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2023				
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: UrusanLingkungan Hidup				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
A	<b>Tujuan Strategis</b>					
	Tujuan Strategis : 1 Terwujudnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup					
I	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>					
1	Berkurangnya peran aktif dari masyarakat/Kelompok/Kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	RSO.01.11.01	5,72	Kabid Tata Lingkungan	Menurunnya kepedulian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Lingkungan menjadi kotor dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit
II	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>					
1	Adanya ketidakpahaman pelaku usaha untuk pengurusan dokumen lingkungan untuk penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha	ROO.01.11.07	9,6	Kabid Tata Lingkungan	Masih belum Sinkronnya peraturan terkait lingkungan hidup dan perizinan berusaha	Pelaku usaha/Kegiatan tidak menyusun Dokumen Lingkungan saat mengajukan persyaratan perizinan berusaha
2	Pelaku usaha/kegiatan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang disyaratkan di dokumen lingkungan	ROO.01.11.08	8,16	Kabid Tata Lingkungan	Pelaku usaha/kegiatan belum memahami isi dokumen lingkungan	Terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
3	Tidak terlaksananya pengujian sesuai dengan musim	ROO.01.11.13	6,16	Kabid PPLKPI	Cuaca yang tidak menentu	Pelaksanaan pekerjaan terhambat
4	Hasil Pengujian kualitas air dibawah baku mutu	ROO.01.11.15	5,28	Kabid PPLPI	Kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah yang dibuang ke sungai meningkat serta buangan dari rumah tangga yang masuk ke sungai	Kondisi air sungai menjadi tercemar
5	Meningkatnya jumlah timbunan sampah spesifik rumah tangga (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.20	5,72	Kabid PPLKPI	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait jenis sampah yang masuk ke dalam sampah spesifik rumah tangga	Terjadinya penumpukan sampah spesifik rumah tangga yang belum dipilah

6	Banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki perizinan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.01.11.21	5,72	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Adanya temuan ketidakpatuhan pelaku usaha/kegiatan terhadap kewajiban yang ada di peraturan perundangan lingkungan	Pelaku usaha/Kegiatan dalam menjalankan kegiatan usahanya melanggar perizinan lingkungan
7	Adanya pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha	ROO.01.11.22	7,2	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Pelaku usaha/Kegiatan kurang mendapat informasi terkait peraturan tata cara pengelolaan izin lingkungan	Kegiatan/usaha tidak memiliki perizinin lingkungan
8	Tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha/kegiatan dalam ketaatan perizinan lingkungan	ROO.01.11.24	6,6	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Dokumen perizinan lingkungan disamakan dengan perizinan yang lainnya	Meningkatnya pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan/usaha
9	Meningkatnya jumlah pengaduan lingkungan hidup	ROO.01.11.26	5,72	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Semakin banyaknya pengaduan lingkungan hidup yang masuk dan mengakibatkan tidak terselesaikannya pengaduan lingkungan hidup
10	Pohon yang di tanam di daerah konservasi mati/kering	ROO.01.11.29	5,72	Kabid PPLKPI	kurangnya perhatian dari petugas pemelihara pohon	Pemeliharaan pohon tidak berjalan dengan baik
<b>I Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>						
1	Tidak maksimal nya PAD Kota Bogor dari Sektor Retribusi Persampahan	RSO. 01.11.07	5,2	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam pembayaran retribusi sampah	Berkurangnya retribusi sampah yang masuk ke kas negara
<b>II Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>						
1	Masih tercampurnya sampah organik dan non organik dari sumber	ROO.01.11.32	6,6	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Kurangnya edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah dari rumah	Sampah masih belum terpilah
2	Kendaraan Pengangkut sampah Rusak	ROO.01.11.33	6	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Tidak terpeliharanya kendaraan kendaraan operasional pengangkut sampah dan umur kendaraan pengangkut sampah	Kendaraan tidak bisa dipakai untuk mengangkut sampah
3	Petugas Kebersihan pengangkut sampah terkena penyakit	ROO.01.11.35	6,76	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Sampah yang menumpuk di Truk dan asap kendaraan bermotor di jalanan	Terhambatnya pelaksanaan pengangkutann sampah

4	Terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS	ROO.01.11.36	6,24	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Kendaraan pengangkut sampah yang rusak (mogok)	Terhambatnya pelaksanaan pengangkutan sampah
5	Adanya Keterlambatan dalam pengerjaan Controll Landfill	ROO.01.11.38	7,68	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Curah hujan tinggi dan terkendala kurangnya alat berat	Pekerjaan akan menjadi bertambah lama tidak sesuai target yang telah ditetapkan serta dapat mengganggu lingkungan.
6	Pada saat pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba alat berat rusak	ROO.01.11.46	5,2	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Umur Alat Berat di TPA Galuga sudah tua	Terhambatnya pengelolaan sampah di TPA di Galuga
7	Terjadinya Kecelakaan kerja pada saat petugas kebersihan menyapu jalan	ROO.01.11.49	5,72	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Kendaraan yang melintas tidak berhati hati dan petugas penyapu tidak memperhatikan SOP penyapuan jalan	Pelaksanaan penyapuan menjadi terhambat

**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN  
(RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)**

<b>Nama Pemda</b>		: Pemerintah Daerah Kota Bogor					
<b>Nama Perangkat Daerah</b>		: Dinas Lingkungan Hidup					
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2023					
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: Urusan Lingkungan Hidup					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<b>Tujuan Strategis</b>						
	Tujuan Strategis : 1 Terwujudnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup						
I	<b>Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>						
1	Berkurangnya peran aktif dari masyarakat/Kelompok/Kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	RSO. 01.11.01	Peningkatan pengembangan kapasitas kelembagaan dengan target meningkatkan jumlah kelompok-kelompok peduli lingkungan, dan jumlah masyarakat yang melakukan inisiatif di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup	Melakukan pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan hidup kepada masyarakat/kelompok/kegiatan usaha	Kabid Tata Lingkungan	Februari- November 2023
II	<b>Risiko Operasional Perangkat Daerah</b>						
1	Adanya ketidakpahaman pelaku usaha untuk pengurusan dokumen lingkungan untuk penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha	ROO.01.11.07	Koordinasi dengan Kegiatan atau usaha terkait pengurusan dokumen lingkungan	Ketidak pahaman pelaku usaha atau kegiatan terkait perizinan lingkungan	Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan terhadap kegiatan atau usaha	Kabid Tata Lingkungan	Februari- November 2023
2	Pelaku usaha/kegiatan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang disyaratkan di dokumen lingkungan	ROO.01.11.08	Koordinasi dengan Kegiatan atau usaha terkait pemahaman isi dokumen lingkungan	Ketidak pahaman pelaku usaha atau kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup	Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009	Kabid Tata Lingkungan	Januari - Desember 2023

3	Tidak terlaksananya pengujian sesuai dengan musim	ROO.01.11.13	Jadwal Pengujian yang sudah dibuat	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	Melaksanakan pengujian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Kabid PPLKPI	Januari - Desember 2023
4	Hasil Pengujian kualitas air dibawah baku mutu	ROO.01.11.15	Sudah dilaksanakan Pengujian Kualitas air setiap musim hujan dan kemarau	Menerapkan Per Men LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang memiliki izin lingkungan AMDAL dan UKL/UPL wajib memiliki Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah	Melaksanakan pembinaan terhadap Kegiatan/usaha untuk melaksanakan pengelolaan kualitas limbah	Kabid PPLKPI	Januari - Desember 2023
5	Meningkatnya jumlah timbunan sampah spesifik rumah tangga (sampah elektronik yang dihasilkan rumah tangga)	ROO.01.11.20	Sudah memiliki PP no 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan sampah spesifik dan UU no 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Melaksanakan Sosialisasi terkait sampah spesifik rumah tangga	Kabid PPLKPI	Januari - Desember 2023
6	Banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki perizinan pengelolaan lingkungan hidup	ROO.01.11.21	Melaksanakan pengawasan kepada kegiatan atau usaha yang belum memiliki perizinan	Masih kurangnya SDM di bidang pengawasan yang berkompeten	menyurati pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan atau usaha untuk menyusun dokumen DELH atau DPLH (bagi kegiatan pemerintah) dan memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menyusun DELH atau DELH (bagi kegiatan swasta)	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Januari - Desember 2023

7	Adanya pelanggaran izin lingkungan yang dilakukan oleh kegiatan usaha	ROO.01.11.22	Melaksanakan pengawasan kepada kegiatan atau usaha	Ketidak pahaman pelaku usaha atau kegiatan terkait perizinan lingkungan	Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang melanggar perizinan lingkungan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2021	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Januari - Desember 2023
8	Tidak terlaksananya kewajiban pelaku usaha/kegiatan dalam ketaatan perizinan lingkungan	ROO.01.11.24	Koordinasi dengan pelaku kegiatan atau usaha	Masih rendahnya pengetahuan para pelaku kegiatan atau usaha terkait lingkungan	Melaksanakan Sosialisasi untuk memberikan informasi dan desiminasi peraturan perundangan terbaru kepada pelaku usaha / kegiatan, terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan serta sanksi yang di dapat bila terjadi pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus mencari jalan keluar bila terjadi kendala dan hambatan.	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Januari - Desember 2023
9	Meningkatnya jumlah pengaduan lingkungan hidup	ROO.01.11.26	Prosedur penanganan pengaduan juga dilaksanakan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup.	SDM terkait pengaduan tidak ada	Memfasilitasi media Pengaduan yaitu melalui media pengaduan berupa telepon, surat, surat elektronik, faksimile, pesan singkat, website, media sosial, aplikasi pengaduan dan media lain sesuai dengan perkembangan teknologi.	Kabid PPLKPI	Januari - Desember 2023
10	Pohon yang di tanam di daerah konservasi mati/kering	ROO.01.11.29	Penanaman pohon sudah sesuai dengan SOP penanaman pohon	Koordinasi dengan wilayah lokasi penanaman	Monitoring dan Evaluasi ke lokasi penanaman pohon	Kabid PPLKPI	Maret - November 2023
<b>I Risiko Strategis Perangkat Daerah</b>							
1	Tidak maksimal nya PAD Kota Bogor dari Sektor Retribusi Persampahan	RSO. 01.11.07	Sudah ada Perda No 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	Kurangnya kesadaran masyarakat/kegiatan atau usaha dalam membayar Retribusi sampah	Sosialisasi kepada masyarakat terkait retribusi sampah serta peningkatan sumber daya manusia di bidang	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023



II	Risiko Operasional Perangkat Daerah						
1	Masih tercampurnya sampah organik dan non organik dari sumber	ROO.01.11.32	Sudah ada Perda No 9 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah	Kurangnya Sarana dan Prasarana di TPS 3R atau Bank Sampah untuk pengelolaan sampah organik dan non organik	Dilaksanakannya Sosialisasi Pengolahan sampah agar masyarakat paham terkait pemilahan sampah organik dan non organik	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023
2	Kendaraan Pengangkut sampah Rusak	ROO.01.11.33	Kurangnya armada pengangkutan sampah yang dimiliki DLH	Kondisi kendaraan pengangkut sampah yang sudah rusak dan umur kendaraan yang sudah tua	Melaksanakan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkut sampah secara berkala serta Pengadaan Armada Pengangkut Sampah yang baru	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023
3	Petugas Kebersihan pengangkut sampah terkena penyakit	ROO.01.11.35	Sudah diberikannya masker dan sarung tangan untuk Petugas Kebersihan pengangkut sampah	Masih banyak petugas pengangkut sampah yang belum mengetahui tentang kesehatan	Dilaksanakannya sosialisasi/penyuluhan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja baik dari segi jenis, fungsi dan manfaat. Sehingga petugas kebersihan pengangkut sampah belum memahami pengetahuan kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023
4	Terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS	ROO.01.11.36	Sudah ada Jadwal Pengangkutan sampah di setiap TPS	pengangkutan sampah di TPS kurang optimal	Melaksanakan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkut sampah secara berkala serta Pengadaan Armada Pengangkut Sampah yang baru	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023
5	Adanya Keterlambatan dalam pengerjaan Controll Landfill	ROO.01.11.38	Telah dilaksanakan pekerjaan controll landfill	Anggaran untuk pekerjaan controll landfill terbatas	Adanya pemeliharaan Alat berat secara rutin	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023

6	Pada saat pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba alat berat rusak	ROO.01.11.46	Alat berat ekskavator yang biasa digunakan untuk menampung dan mengolah sampah yang diturunkan dari truk sampah mengalami kerusakan	Alat berat kurang mendapat perawatan yang optimal	Adanya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk control landfill	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023
7	Terjadinya Kecelakaan kerja pada saat petugas kebersihan menyapu jalan	ROO.01.11.49	Petugas kebersihan Sudah dibekali atribut berupa rompi safety scotlight saat menjalankan tugasnya	Ketidak hati-hatian petugas kebersihan pada saat menyapu jalan	Diterapkannya SOP Penyapu Jalan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023

**RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

<b>Nama Pemda</b>		<b>: Pemerintah Daerah Kota Bogor</b>					
<b>Nama Perangkat Daerah</b>		<b>: Dinas Lingkungan Hidup</b>					
<b>Tahun Penilaian</b>		<b>: 2023</b>					
<b>Urusan Pemerintahan</b>		<b>: Urusan Lingkungan Hidup</b>					
<b>No</b>	<b>Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan</b>	<b>Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian</b>	<b>Penyedia Informasi</b>	<b>Penerima Informasi</b>	<b>Rencana Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Realisasi Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Melakukan pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan hidup kepada masyarakat/kelompok/kegiatan usaha	Sosialisasi dan Pelatihan	DLH dan Komunitas Peduli Lingkungan	Masyarakat, Pelaku Kegiatan/Usaha	Februari-November 2023		
2	Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan terhadap kegiatan atau usaha	Sosialisasi dan Pelatihan	DLH dan Komunitas Peduli Lingkungan	Pelaku Kegiatan/usaha	Februari-November 2023		
3	Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009	Surat Teguran dan Berita Acara	DLH	Pelaku Kegiatan/usaha	Januari -Desember 2023		
4	Melaksanakan pengujian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pelatihan	DLH	DLH, Laboratorium	Januari - Desember 2023		
5	Melaksanakan pembinaan terhadap Kegiatan/usaha untuk melaksanakan pengelolaan kualitas limbah	Pembinaan atau pelatihan	DLH	Pelaku Kegiatan/usaha	Januari - Desember 2023		
6	Melaksanakan Sosialisasi terkait sampah spesifik rumah tangga	Sosialisasi	DLH	Masyarakat	Januari - Desember 2023		
7	Menyurati pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan atau usaha untuk menyusun dokumen DELH atau DPLH (bagi kegiatan pemerintah) dan memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menyusun DELH atau DELH (bagi kegiatan swasta)	Surat	DLH	Pelaku Kegiatan/usaha	Januari - Desember 2023		
8	Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang melanggar perizinan lingkungan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2021	Surat, Sosialisasi, Rapat	DLH, Kementerian Lingk Hidup	Pelaku Kegiatan/usaha	Januari - Desember 2023		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Melaksanakan Sosialisasi untuk memberikan informasi dan desiminasi peraturan perundangan terbaru kepada pelaku usaha / kegiatan, terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan serta sanksi yang di dapat bila terjadi pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus mencari jalan keluar bila terjadi kendala dan hambatan.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi	DLH	Pelaku Kegiatan/usaha	Januari - Desember 2023		
10	Memfasilitasi media Pengaduan yaitu melalui media pengaduan berupa telepon, surat, surat elektronik, faksimile, pesan singkat, website, media sosial, aplikasi pengaduan dan media lain sesuai dengan perkembangan teknologi	Surat Teguran dan Berita Acara	DLH	Wilayah (Kecamatan dan Kelurahan) dan Pelaku/Usaha	Januari - Desember 2023		
11	Monitoring dan Evaluasi ke lokasi penanaman pohon	Rapat Koordinasi	DLH	Wilayah (Kecamatan dan Kelurahan)	Januari - Desember 2023		
12	Sosialisasi kepada masyarakat terkait retribusi sampah serta peningkatan sumber daya manusia di bidang persampahan	Sosialisasi	DLH	Masyarakat, Pelaku Kegiatan/Usaha	Januari - Desember 2023		
13	Masyarakat menyiapkan satu wadah khusus untuk membuang sampah kemasan atau non organik agar tidak tercampur dengan sampah organik dan bisa dibawa ke Bank Sampah atau TPS 3R	Sosialisasi, Surat Edaran	DLH	Masyarakat	Januari - Desember 2023		
14	Melaksanakan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkut sampah secara berkala serta Pengadaan Armada Pengangkut Sampah yang baru	Surat, Rapat	DLH	DLH	Januari - Desember 2023		
15	Dilaksanakannya sosialisasi/penyuluhan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja baik dari segi jenis, fungsi dan manfaat. Sehingga petugas kebersihan pengangkut sampah belum memahami pengetahuan kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik.	Sosialisasi, Rapat, Pelatihan	DLH	DLH	Januari - Desember 2023		
16	Melaksanakan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkut sampah secara berkala serta Pengadaan Armada Pengangkut Sampah yang baru	Surat usulan, Rapat	DLH	DLH dan Penyedia	Januari - Desember 2023		
17	Adanya pemeliharaan Alat berat secara rutin	Rapat Koordinasi	DLH	DLH dan Penyedia	Januari - Desember 2023		
18	Adanya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk control landfill	Rapat Koordinasi	DLH	DLH	Januari - Desember 2023		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Dalam menjalankan tugasnya petugas kebersihan harus menerapkan SOP Penyapu jalan	Surat, SOP	DLH	DLH	Januari - Desember 2023		

## RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

<b>Nama Pemda</b>		: Pemerintah Daerah Kota Bogor				
<b>Nama Perangkat Daerah</b>		: Dinas Lingkungan Hidup				
<b>Tahun Penilaian</b>		: 2023				
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: Urusan Lingkungan Hidup				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Melakukan pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan hidup kepada masyarakat/kelompok/kegiatan usaha	Monitoring langsung	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Februari-November 2023		
2	Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan terhadap kegiatan atau usaha	Monitoring langsung	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Februari-November 2023		
3	Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009	Monitoring langsung atau memberikan arahan kepada pelaku usaha	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Jabuar -Desember 2023		
4	Melaksanakan pengujian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Monitoring langsung	Kepala Bidang Pengendalian, pencemaran Lingkungan Konservasi dan	Februari - Desember 2023		
5	Melaksanakan pembinaan terhadap Kegiatan/usaha untuk melaksanakan pengelolaan kualitas limbah	Pemantauan berkelanjutan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Maret - Desember 2023		
6	Melaksanakan Sosialisasi terkait sampah spesifik rumah tangga	Identifikasi timbulan sampah spesifik rumah tangga	Kepala Bidang Pengendalian, pencemaran Lingkungan Konservasi dan	Januari - Desember 2023		
7	menyurati pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan atau usaha untuk menyusun dokumen DELH atau DPLH (bagi kegiatan pemerintah) dan memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menyusun DELH atau DELH (bagi kegiatan swasta)	Monitoring langsung atau memberikan arahan kepada pelaku usaha	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Maret - Desember 2023		
8	Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang melanggar perizinan lingkungan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2021	Monitoring langsung atau memberikan arahan kepada pelaku usaha	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Maret - Desember 2023		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
9	Melaksanakan Sosialisasi untuk memberikan informasi dan desiminasi peraturan perundangan terbaru kepada pelaku usaha / kegiatan, terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan serta sanksi yang di dapat bila terjadi pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus mencari jalan keluar bila terjadi kendala dan hambatan.	Monitoring langsung atau memberikan arahan kepada pelaku usaha	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Oktober - Desember 2022		
10	Memfasilitasi media Pengaduan yaitu melalui media pengaduan berupa telepon, surat, surat elektronik, faksimile, pesan singkat, website, media sosial, aplikasi pengaduan dan media lain sesuai dengan perkembangan teknologi.	Melaksanakan survey/cek lapangan	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Januari - Desember 2023		
11	Monitoring dan Evaluasi ke lokasi penanaman pohon	Monitoring dan Evaluasi hasil penanaman	Kepala Bidang PPLKPI	April - Desember 2023		
12	Sosialisasi kepada masyarakat terkait retribusi sampah serta peningkatan sumber daya manusia di bidang persampahan	Pelaksanaan kegiatan perbaikan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023		
13	Masyarakat menyiapkan satu wadah khusus untuk membuang sampah kemasan atau non organik agar tidak tercampur dengan sampah organik dan bisa dibawa ke Bank Sampah atau TPS 3R	Monitoring Langsung	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Februari - Desember 2023		
14	Melaksanakan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkut sampah secara berkala serta Pengadaan Armada Pengangkut Sampah yang baru	Pelaksanaan kegiatan perbaikan	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Februari - Desember 2023		
15	Dilaksanakannya sosialisasi/penyuluhan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja baik dari segi jenis, fungsi dan manfaat. Sehingga petugas kebersihan pengangkut sampah belum memahami pengetahuan kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik.	Monitoring Langsung	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Januari - Desember 2023		
16	Melaksanakan Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkut sampah secara berkala serta Pengadaan Armada Pengangkut Sampah yang baru	Pelaksanaan kegiatan perbaikan	Kepala UPTD TPAS Galuga	Januari - Desember 2023		
17	Adanya pemeliharaan Alat berat secara rutin	Pelaksanaan kegiatan perbaikan	Kepala UPTD TPAS	Januari - Desember 2023		
18	Adanya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk control landfill	Pelaksanaan kegiatan perbaikan	Kepala UPTD TPAS Galuga	Januari - Desember 2023		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
19	Dalam menjalankan tugasnya petugas kebersihan harus menerapkan SOP Penyapu	Monitoring Langsung	Kepala Bidang Pengelolaan	Januari - Desember 2023		